



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN  
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Bandara Nusawiru No. 10 Cijulang - Pangandaran Kode pos 46394  
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/546/Kpts.-DKPKP/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KELAUTAN  
PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021-2026

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ..... Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor .....);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KETIGA : Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Sistematisa Penulisan Renstra Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematisa penulisan.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN  
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cijulang

Pada tanggal : 3 September 2021

**KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PANGANDARAN**



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**

Pembina, IV/a

NIP. 19710628 200312 1 005

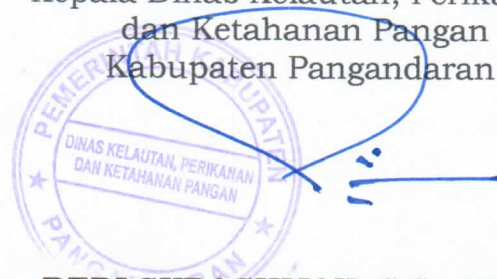
## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah penjabaran RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2020.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dokumen Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam perumusan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam merencanakan program prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia.

Cijulang, 3 September 2021  
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan  
dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pangandaran



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**

Pembina, IV/a

NIP. 19710628 200312 1 005

# DAFTAR ISI

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                 | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                      | ii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                   | iv |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                   | v  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                                                              | 1  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                              | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                             | 2  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                           | 3  |
| 1.3.1 Maksud.....                                                                                    | 3  |
| 1.3.2 Tujuan .....                                                                                   | 4  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                       | 4  |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....                                                      | 6  |
| 2.1 Aspek Geografi Daerah dan Demografi .....                                                        | 6  |
| 2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah.....                                                              | 6  |
| 2.1.2 Kondisi Demografi .....                                                                        | 14 |
| 2.1.3 Potensi Pengembangan wilayah .....                                                             | 19 |
| 2.2 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                                     | 26 |
| 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                   | 26 |
| 2.1.2 Susunan Organisasi.....                                                                        | 46 |
| 2.3 Sumberdaya Perangkat Daerah .....                                                                | 47 |
| 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                          | 48 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....                               | 49 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH .....                                     | 51 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 51 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....            | 57 |
| 3.2.1 Visi Kabupaten Pangandaran.....                                                                | 57 |
| 3.2.2 Misi Kabupaten Pangandaran .....                                                               | 57 |
| 3.2.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran.....                                                  | 60 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....                                                           | 62 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....                   | 65 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                                | 66 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....                                                                       | 68 |

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....68

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....70

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...73

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....76

BAB VIII PENUTUP .....79

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Luas dan batas wilayah administrasi .....                                                                 | 6  |
| Tabel 2. Kondisi Topografi .....                                                                                   | 8  |
| Tabel 3. Jenis batuan di Kabupaten Pangandaran .....                                                               | 11 |
| Tabel 4. DAS di Kabupaten Pangandaran .....                                                                        | 11 |
| Tabel 5. Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran .....                                                           | 13 |
| Tabel 6. Jumlah penduduk, kepadatan, dan jumlah KK di Kabupaten Pangandaran .....                                  | 14 |
| Tabel 7. Persentase penyebaran penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran .....                               | 15 |
| Tabel 8. Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 .....                       | 16 |
| Tabel 9. Pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran .....                                             | 18 |
| Tabel 10. Kelompok LPM, KWT, Pokdakan, KUB, Poklashar, Kugar, Gapokkan dan Koperasi di Kabupaten Pangandaran ..... | 19 |
| Tabel 11. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut : .....            | 20 |
| Tabel 12. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pangandaran menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Rp. Juta) .....   | 21 |
| Tabel 13 Perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut : .....           | 21 |
| Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut : .....            | 22 |
| Tabel 15. Tabel Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 s.d 2020 .....                                                 | 23 |
| Tabel 16. Tabel Target dan realisasi Konsumsi Ikan Tahun 2016 s.d 2020 .....                                       | 24 |
| Tabel 17. Tabel Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2016 s.d 2020 .....                                                  | 25 |
| Tabel 18. Tabel Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d 2020 .....                                                   | 25 |
| Tabel 19. Aset di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran .....                            | 48 |
| Tabel 20. Tabel Analisis SWOT .....                                                                                | 55 |
| Tabel 21. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran .....                                                           | 60 |
| Tabel 22. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran .....                                                          | 66 |
| Tabel 23. Tabel T.C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan .....     | 68 |
| Tabel 24. Tabel T.C 26 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan .....    | 70 |
| Tabel 25. Tabel T.C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....         | 77 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Peta batas administrative Kabupaten Pangandaran .....                                                                               | 7  |
| Gambar 2 Time Series Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap<br>PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran. | 20 |
| Gambar 3. Grafik Realisasi Kinerja Perbandingan Indikator Sasaran Tahun<br>2016-2020.....                                                     | 22 |
| Gambar 4 Grafik Realisasi Kinerja Perbandingan Indikator Program Tahun<br>2016-2020.....                                                      | 22 |
| Gambar 5 Time Series Skor Pola Pangan Harapan .....                                                                                           | 23 |
| Gambar 6 Grafik Skor PPH Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan Nasional<br>Tahun 2015 - 2019 .....                                            | 23 |
| Gambar 7 Grafik Skor PPH Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.....                                                                         | 24 |
| Gambar 8 Grafik Konsumsi Ikan Tahun 2016 s.d 2020.....                                                                                        | 24 |
| Gambar 9 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2016 s.d 2020 .....                                                                             | 25 |
| Gambar 10 Grafik Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d 2020.....                                                                              | 25 |

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Tabel T.C 23..... 81

Lampiran 2. Tabel T.C 24..... 83

Lampiran 3. Pohon Kinerja..... 85

Lampiran 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 86

Lampiran 5. Rumusan Renstra Pendanaan Tahun 2021-2026..... 88

Lampiran 6. Hasil Rapat Koodinasi Penyusunan Renstra Bulan  
Maret, April, dan Mei Tahun 2021..... 92

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Instansi adalah dokumen perencanaan SKPD jangka menengah (5 tahun), yang memuat visi, misi, tujuan strategi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 point 1 ( 1 ) dan pasal 19 point ( 2 ), Bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan instansi untuk menyesuaikan kembali dengan kondisi terbaru, sehingga diperlukannya pembaharuan renstra yang sebelumnya telah disusun. Melalui kegiatan reviu renstra maka mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya dilakukan penyusunan renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Periode Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) teknokratik Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026. Penyusunan dokumen Renstra ini berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, analisis lingkungan, isu-isu yang terus berkembang, serta arah kebijakan daerah dan nasional.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan dan arahan bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Pangandaran dalam merencanakan dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta bidang pangan selama tahun 2021 – 2026 secara menyeluruh dan terintegrasi.

Renstra yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka lima (5) tahunan.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan hasil reviu renstra sebelumnya yang sudah disusun berdasarkan pada penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2020, tupoksi, isu-isu yang terus berkembang serta arah kebijakan daerah, provinsi dan nasional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hokum penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor ..... Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor .....);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
  14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJM – Daerah Kabupaten

Pangandaran 2021 - 2026, sebagai dokumen perencanaan pembangunan kelautan, perikanan dan ketahanan pangan, yang menjadi arah kebijakan pembangunan bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan selama 5 ( lima ) tahun.

### **1.3.2 Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen untuk pedoman pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun, dengan tujuan :

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah di bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- 2) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ke dalam program prioritas serta Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
- 3) Menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Aspek Geografi Daerah dan Demografi**

**2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah**

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap). Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 Kecamatan dan 93 Desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km<sup>2</sup>, dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Luas dan batas wilayah administrasi**

| No            | Kecamatan     | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Jumlah RW  | Jumlah RT    |
|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| [1]           | [2]           | [3]                             | [4]         | [5]          | [6]        | [7]          |
| 1             | Parigi        | 111,23                          | 10          | 53           | 122        | 399          |
| 2             | Cijulang      | 94,37                           | 7           | 38           | 90         | 252          |
| 3             | Cimerak       | 190,22                          | 11          | 51           | 99         | 357          |
| 4             | Cigugur       | 117,82                          | 7           | 39           | 64         | 200          |
| 5             | Langkaplancar | 205,54                          | 15          | 66           | 115        | 414          |
| 6             | Mangunjaya    | 31,98                           | 5           | 28           | 47         | 233          |
| 7             | Padaherang    | 112,76                          | 14          | 60           | 142        | 443          |
| 8             | Kalipucang    | 104,27                          | 9           | 29           | 80         | 291          |
| 9             | Pangandaran   | 75,57                           | 8           | 33           | 90         | 344          |
| 10            | Sidamulih     | 90,47                           | 7           | 33           | 68         | 263          |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>1.134,23</b>                 | <b>93</b>   | <b>430</b>   | <b>917</b> | <b>3.196</b> |

Sumber: RPJMD Kab.Pangandaran 2021-2026

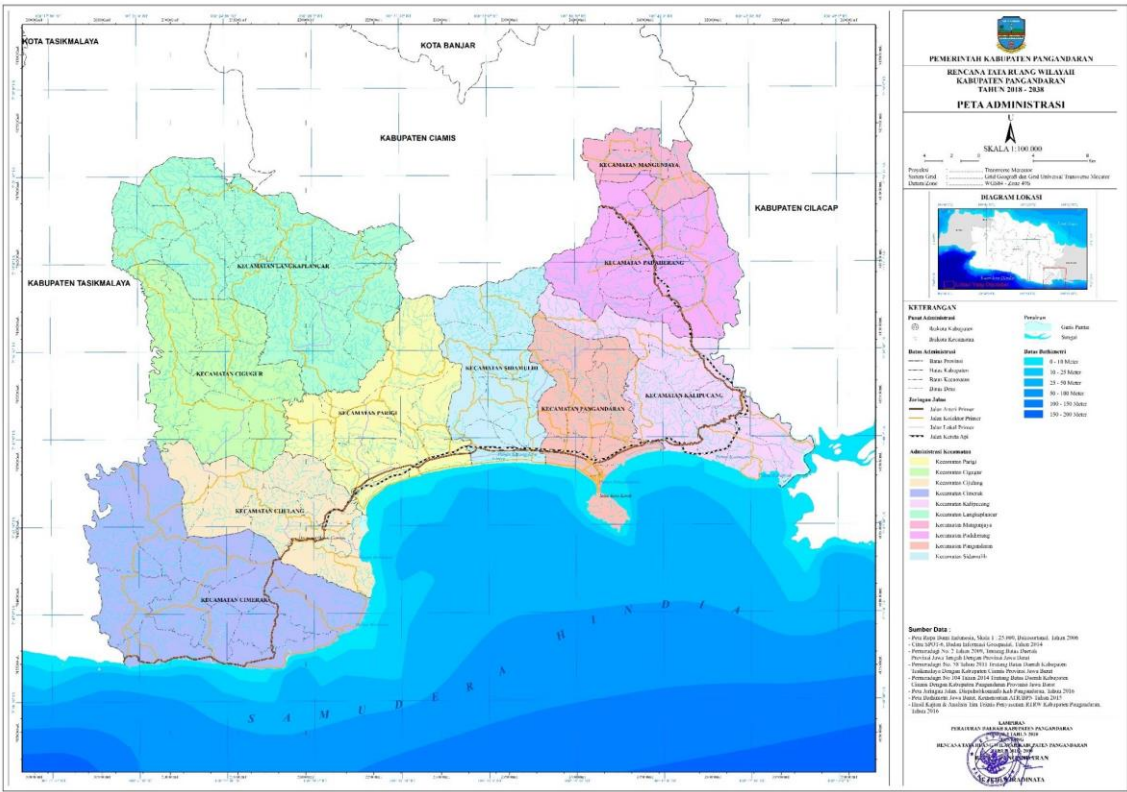
Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada 108°8'0" sampai dengan 108°50'0" Bujur Timur dan 7°24'0" sampai dengan 7°54'20" Lintang Selatan. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan

Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas Kabupaten dan batas Kecamatan.



Gambar 1. Peta batas administrative Kabupaten Pangandaran

B. Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m di atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam table di bawah ini.

**Tabel 2. Kondisi Topografi**

| No | Kecamatan     | Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cimerak       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur.</li> <li>• Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.</li> </ul> |
| 2  | Cijulang      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.</li> <li>• Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.</li> </ul>                                                             |
| 3  | Cigugur       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi.</li> <li>• Ketinggian wilayah di kecamatan Cigugur relative sama antara 200-500 mdpl.</li> </ul>                    |
| 4  | Langkaplancar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran.</li> <li>• Ketinggian wilayah di kecamatan Langkaplancar relative sama antara 400-1.000 mdpl.</li> </ul>                              |
| 5  | Parigi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl.</li> <li>• Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Desa Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.</li> </ul>                      |
| 6  | Sidamulih     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan Kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.</li> <li>• Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni Desa Kersaratu dan Kalijati.</li> </ul>                               |
| 7  | Pangandaran   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan daerah pesisir pantai, ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi.</li> <li>• Ketinggian: 3-500 mdpl.</li> </ul>                                                                   |
| 8  | Kalipucang    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran</li> </ul>                                                                                                          |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | <p>tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Padaherang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah ini bukan pesisir.</li> <li>• Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl.</li> <li>• Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl).</li> <li>• Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.</li> </ul> |
| 10 | Mangunjaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir.</li> <li>• Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038

### C. Kondisi Geologi

Menurut kondisi geologi nya, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara - barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

- Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng  $< 5\%$ . Ketinggian antara 0-50 m di atas permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran – Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
- Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng  $> 25\%$ , ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan

laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Yang paling banyak di jumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.

#### 1. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang

- 1) Tanah lapukan berupa lempung pasir-pasiran-kerikil, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang- tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
- 2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

#### 2. Perbukitan Terjal Pananjung

Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

- c. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya

pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil.

Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Jenis batuan di Kabupaten Pangandaran**

| No | Jenis Batuan                       | Luas (Ha)         |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 1  | Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)   | 1.649,77          |
| 2  | Batu Gamping Oligo - Miosen        | 35.296,43         |
| 3  | Batuan Gunungapi Oligo - Miosen    | 37.349,30         |
| 4  | Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio) | 6.869,57          |
| 5  | Batuan Sedimen Oligo - Miosen      | 11.800,95         |
| 6  | Batuan Sedimen Plio - Plistosen    | 20.358,12         |
|    | <b>Grand Total</b>                 | <b>113.324,15</b> |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038 dan KBAK-ESDM

D. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciwulan- Cilaki, dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. DAS di Kabupaten Pangandaran**

| No | Nama DAS              | Luas (Ha)         |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1  | DAS Ciawulan – Cilaki | 91.250,39         |
| 2  | Das Citanduy          | 22.074,72         |
|    | <b>Grand Total</b>    | <b>113.325,11</b> |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air

tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan

vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.

2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar.

Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

#### E. Kondisi Klimatologi

Secara umum Kabupaten Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembapan udara antara 85-89% dengan suhu 20-30°C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran. Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam

keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Musim barat terjadi pada bulan November sampai April, dimana pada saat musim ini banyak sebagian nelayan tidak melakukan operasi penangkapan ikan di laut karena kondisi laut dengan ombak yang besar dan curah hujan yang relatif banyak. Secara umum lokasi perencanaan termasuk dalam kawasan beriklim tropis basah yang ditandai dengan pergerakan matahari di garis isotherm sepanjang tahun dengan panjang hari selama 12 jam.

F. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04 Ha atau 20,10% kedua untuk lahan kebun yaitu seluas kurang lebih 24.917 ha atau sekitar 16,58% yang berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha atau sekitar 16,42% dari total penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran**

| No | Penggunaan Lahan            | Luas (Ha) |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | Irigasi teknis              | 9.651,00  |
| 2  | Irigasi setengah teknis     | 3.578,98  |
| 3  | Irigasi sederhana PU        | 1.950,00  |
| 4  | Irigasi sederhana Non PU    | -         |
| 5  | Tadah hujan                 | 8.906,00  |
| 6  | Pasang surut                | 9,00      |
| 7  | Lebak                       | 607,00    |
| 8  | Rawa                        | -         |
| 9  | Pekarangan dan bangunan     | 24.678,00 |
| 10 | Tegal/kebun/lading/hum      | 24.917,00 |
| 11 | Penggembalaan/padang rumput | 1.758,00  |
| 12 | Sementara tidak diusahakan  | 9.031,00  |
| 13 | Hutan rakyat                | 30.202,04 |
| 14 | Hutan negara                | 17.047,56 |
| 15 | Hutan mangrove              | 310,00    |
| 16 | Perkebunan negara/swasta    | 4.342,35  |
| 17 | Rawa yang ditanamai         | -         |

| No | Penggunaan Lahan   | Luas (Ha)         |
|----|--------------------|-------------------|
| 18 | Tambak             | -                 |
| 19 | Kolam/empang       | 13.272,00         |
| 20 | Lain-lain          | -                 |
|    | <b>Grand Total</b> | <b>150.259,93</b> |

Sumber: LKPJ Kab. Pangandaran, 2019

### 2.1.2 Kondisi Demografi

#### A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 yaitu 426.483 jiwa. Dari jumlah tersebut proporsi penduduk laki-laki dan perempuan terlihat hampir seimbang yaitu 212.910 dan 213.573 jiwa.

Berdasarkan KK, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Padaherang dengan KK sebanyak 25.435 KK, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Cigugur dengan KK sebanyak 8.391 KK. Kecamatan Parigi sebagai ibukota kabupaten memiliki penduduk dengan KK sebanyak 17.730 KK. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk, kepadatan, dan jumlah KK di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020.

**Tabel 6. Jumlah penduduk, kepadatan, dan jumlah KK di Kabupaten Pangandaran**

| No  | Kecamatan     | Penduduk (Jiwa) |                | Jumlah (Jiwa)  | Jumlah (KK)    |
|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |               | Laki-Laki       | Perempuan      |                |                |
| (1) | (2)           | (3)             | (4)            | (5)            | (6)            |
| 1   | Parigi        | 22.571          | 23.313         | 45.884         | 17.730         |
| 2   | Cijulang      | 13.817          | 14.477         | 28.294         | 11.132         |
| 3   | Cimerak       | 24.475          | 24.496         | 48.971         | 17.868         |
| 4   | Cigugur       | 11.547          | 11.318         | 22.865         | 8.391          |
| 5   | Langkaplancar | 26.036          | 25.397         | 51.433         | 18.418         |
| 6   | Mangunjaya    | 16.541          | 16.611         | 33.152         | 12.010         |
| 7   | Padaherang    | 34.682          | 34.821         | 69.503         | 25.435         |
| 8   | Kalipucang    | 19.428          | 19.401         | 38.829         | 14.140         |
| 9   | Pangandaran   | 29.056          | 28.857         | 57.913         | 20.611         |
| 10  | Sidamulih     | 14.757          | 14.882         | 29.639         | 11.435         |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>212.910</b>  | <b>213.573</b> | <b>426.483</b> | <b>157.170</b> |

Sumber: RPJMD Pangandaran 2021-2026

#### B. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah, pada Tahun 2019, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 233,53 jiwa per kilometre persegi yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 97,29 kilometer persegi, dan kepadatan penduduk terendah kedua

yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 288,73 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 941,90 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan Padaherang dengan kepadatan 581,34 jiwa per kilometre persegi dari luas wilayah 118,87 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 69.104 jiwa. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2019. Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah, pada Tahun 2020, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 194,07 jiwa per kilometer persegi yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 117,82 kilometer persegi, dan kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 250,23 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.036,73 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 766,34 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 75,57 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 57.913 jiwa. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

**Tabel 7. Persentase penyebaran penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran**

| No            | Kecamatan     | Luas Wilayah<br>(Km2) | Jumlah<br>Penduduk | Kepadatan<br>Penduduk |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |               |                       | (Jiwa)             | (Jiwa)                |
| [1]           | [2]           | [3]                   | [4]                | [5]                   |
| 1             | Parigi        | 111,23                | 45.884             | 412,50                |
| 2             | Cijulang      | 94,37                 | 28.294             | 299,82                |
| 3             | Cimerak       | 190,22                | 48.971             | 257,44                |
| 4             | Cigugur       | 117,82                | 22.865             | 194,07                |
| 5             | Langkaplancar | 205,54                | 51.433             | 250,23                |
| 6             | Mangunjaya    | 31,98                 | 33.152             | 1.036,73              |
| 7             | Padaherang    | 112,76                | 69.503             | 616,38                |
| 8             | Kalipucang    | 104,27                | 38.829             | 372,39                |
| 9             | Pangandaran   | 75,57                 | 57.913             | 766,34                |
| 10            | Sidamulih     | 90,47                 | 29.639             | 327,61                |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>1.134,23</b>       | <b>426.483</b>     | <b>376,01</b>         |

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 sebanyak 426.483 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 0,40 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 424.786 jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran yaitu dari 374,52 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2019 menjadi 376,01 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2020.

C. Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), hal tersebut dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 8. Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2020**

| No     | Struktur Usia | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) |
|--------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1      | 0-4           | 12.498           | 11.633           | 24.131        |
| 2      | 05-09         | 16.641           | 15.275           | 31.916        |
| 3      | 10-14         | 17.207           | 16.259           | 33.466        |
| 4      | 15-19         | 14.149           | 14.070           | 28.219        |
| 5      | 20-24         | 17.432           | 16.612           | 34.044        |
| 6      | 25-29         | 16.243           | 15.357           | 31.600        |
| 7      | 30-34         | 14.449           | 14.012           | 28.461        |
| 8      | 35-39         | 14.942           | 15.173           | 30.115        |
| 9      | 40-44         | 14.183           | 15.245           | 29.428        |
| 10     | 45-49         | 14.947           | 15.982           | 30.929        |
| 11     | 50-54         | 14.472           | 15.886           | 30.358        |
| 12     | 55-59         | 13.205           | 14.135           | 27.340        |
| 13     | 60-64         | 11.282           | 11.714           | 22.996        |
| 14     | 65+           | 21.260           | 22.220           | 43.480        |
| 15     | 0-4           | 12.498           | 11.633           | 24.131        |
| Jumlah |               | 212.910          | 213.573          | 426.483       |

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di antaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk diantaranya :

1. Faktor fisiografis, bahwa penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.
2. Faktor biologi, karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.
3. Faktor kebudayaan dan teknologi, bahwa daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Permasalahan lain terkait dengan kependudukan yaitu, masalah urbanisasi yang menyebabkan penduduk perkotaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Intensitas mobilitas penduduk yang semakin tinggi tentu saja akan menuntut jaringan prasarana yang semakin baik dan luas yang dapat berdampak secara jangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mengantisipasi meningkatnya urbanisasi, diantaranya melalui peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini

menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), hal tersebut dapat menggambarkan makin banyak jumlah penduduk yang produktif makin rendah angka ketergantungan nya dan sebaliknya.

Adapun dari jumlah penduduk sebanyak 426.483 orang diatas yang potensial memiliki peran dalam pembangunan bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan terdiri dari 1.271 RTP, 1.546 RTBP, 80 bakul, 9 koperasi, 241 KUB, 375 Pokdakan dan 184 LPM.

Pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran terdiri dari Rumah Tangga Perikanan, Rumah Tangga Buruh Perikanan dan Bakul dengan rincian sebagaimana table berikut.

**Tabel 9. Pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran**

| No.    | Kecamatan      | Pelaku Usaha Perikanan Tangkap |       |         |       |
|--------|----------------|--------------------------------|-------|---------|-------|
|        |                | RTP                            | RTBP  | Nelayan | Bakul |
| 1.     | Cimerak        | 84                             | 232   | 316     | 11    |
| 2.     | Cijulang       | 251                            | 88    | 339     | 9     |
| 3.     | Parigi         | 217                            | 287   | 504     | 26    |
| 4.     | Sidamulih      | 0                              | 35    | 35      | -     |
| 5.     | Pangandaran    | 630                            | 521   | 1.151   | 34    |
| 6.     | Kalipucang     | 89                             | 233   | 322     | -     |
| 7.     | Mangunjaya     | -                              | 18    | 18      | -     |
| 8.     | Padaherang     | -                              | 119   | 119     | -     |
| 9.     | Cigugur        | -                              | 9     | 9       | -     |
| 10.    | Langkap lancar | -                              | 4     | 4       | -     |
| Jumlah |                | 1.271                          | 1.546 | 2.817   | 80    |

RTP : Rumah Tangga Perikanan (Pemilik atau Pemilik Merangkap Pekerja)

RTBP : Rumah Tangga Buruh Perikanan (Pekerja/ABK)

Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Pokdakan, KUB dan Koperasi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 10. Kelompok LPM, KWT, Pokdakan, KUB, Poklashar, Kugar, Gapokkan dan Koperasi di Kabupaten Pangandaran**

| No.   | Kecamatan     | Kelompok             |     |          |     |           |       |          | Koperasi |
|-------|---------------|----------------------|-----|----------|-----|-----------|-------|----------|----------|
|       |               | Lumbung Pangan Masy. | KWT | Pokdakan | KUB | Poklashar | Kugar | Gapokkan |          |
| 1.    | Cimerak       | 10                   | 4   | 18       | 17  | -         | 3     | -        | 3        |
| 2.    | Cijulang      | 9                    | 2   | 37       | 29  | 2         | -     | -        | 2        |
| 3.    | Cigugur       | 8                    | 4   | 11       | -   | -         | -     | -        | -        |
| 4.    | Langkaplancar | 9                    | 5   | 54       | -   | -         | -     | -        | -        |
| 5.    | Parigi        | 26                   | 4   | 67       | 30  | 5         | -     | 1        | 1        |
| 6.    | Sidamulih     | 34                   | 1   | 29       | 3   | -         | -     | 1        | -        |
| 7.    | Pangandaran   | 11                   | 4   | 43       | 134 | 19        | -     | 2        | 1        |
| 8.    | Kalipucang    | 10                   | 2   | 19       | 24  | -         | -     | -        | 2        |
| 9.    | Padaherang    | 34                   | 7   | 56       | 4   | -         | -     | -        | -        |
| 10.   | Mangunjaya    | 35                   | 3   | 38       | -   | -         | -     | 1        | -        |
| Total |               | 184                  | 36  | 372      | 241 | 26        | 3     | 5        | 9        |

**2.1.3 Potensi Pengembangan wilayah**

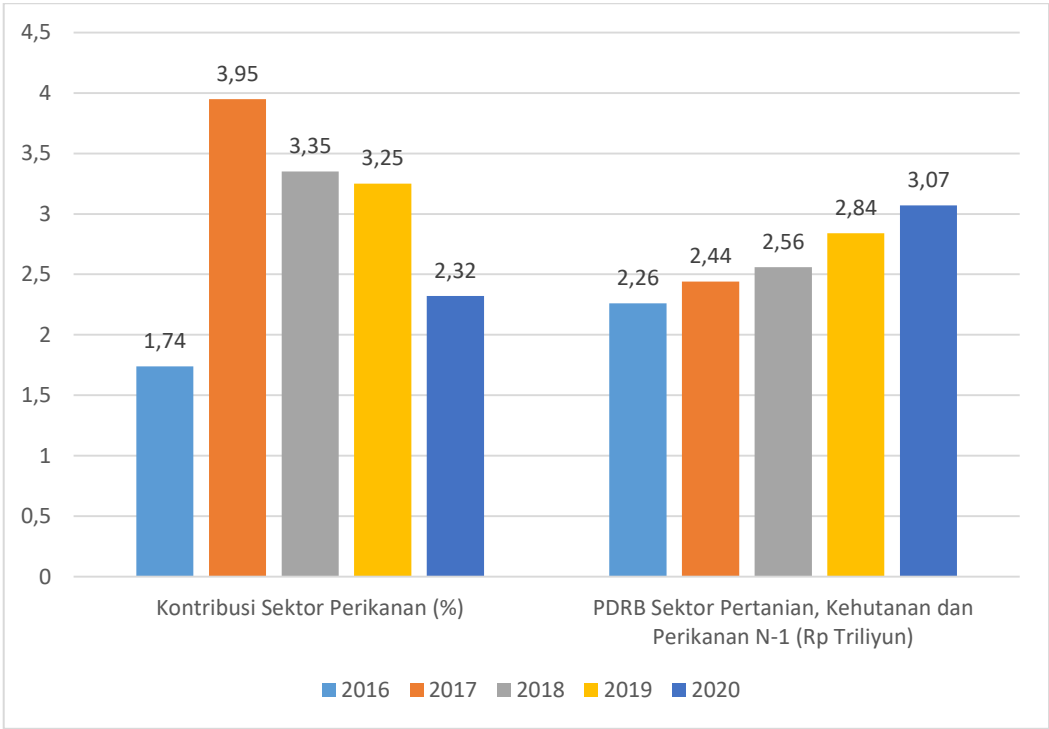
Potensi pengembangan perikanan pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran pada akhir tahun 2020 adalah 426.483 orang (RPJMD Kab. Pangandaran 2021-2026) yang diprediksi semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga berpotensi meningkatnya permintaan kebutuhan bahan pangan. Untuk mengantisipasi hal ini, pemenuhan produksi pangan tidak dapat lagi hanya mengandalkan produksi dari lahan pertanian di darat, namun juga harus dipenuhi dari lingkungan perairan, terutama untuk produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Terlebih lagi masyarakat semakin sadar dan semakin membutuhkan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi yang terkandung dalam ikan. Hal ini tentu saja menjadi peluang pengembangan perikanan ke depan, diantaranya :

- Pengembangan Sentra Nelayan
- Pengembangan Sentra Budidaya
- Pengembangan Sentra Pengolah Hasil Perikanan
- Pengembangan Jaringan Distribusi Pemasaran Produk Perikanan
- Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- Pengembangan Ketersediaan dan Stok Pangan
- Menekan Jumlah Daerah Rawan Pangan, dan
- Meningkatkan Keamanan dan Keanekaragaman Pangan

Tabel 11. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja                      | Capaian (%) |            |            |            |            |
|----|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                        | Tahun 2016  | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1  | Persentase Kontribusi Sektor Perikanan | 88,78       | 197,5      | 163,41     | 154,76     | 107,93     |

Sebagai perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Gambar 2 Time Series Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran

Dari gambar diatas dapat dilihat grafik Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB yang paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dan terus menurun sampai dengan tahun 2020, sedangkan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan N-1 (Rp Triliyun).

Tabel 12. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Pangandaran menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Rp. Juta)

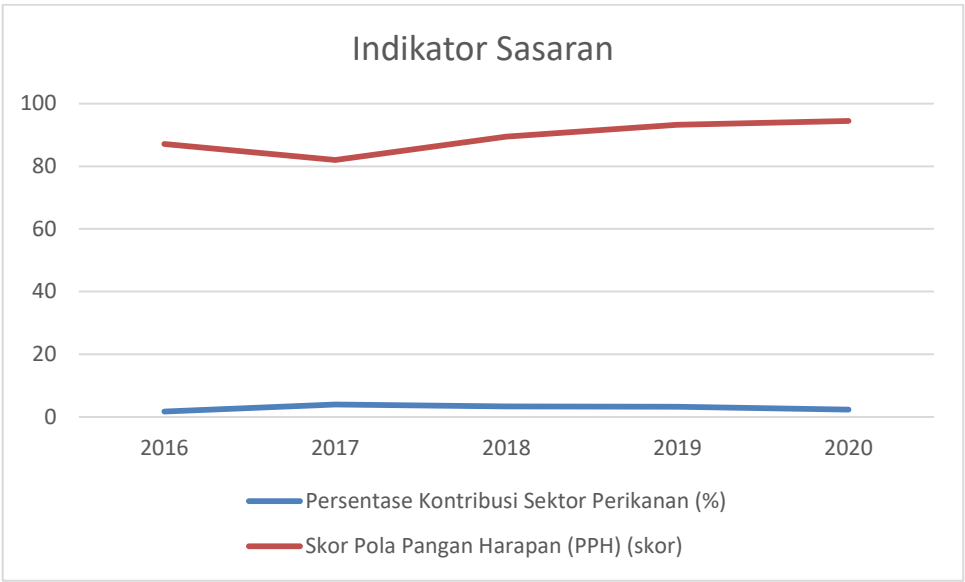
| Uraian                                     | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Kontribusi Sektor Perikanan                | -            | 1,74         | 3,95         | 3,35         | 3,25         | 2,32 |
| Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.255.376,23 | 2.445.301,64 | 2.564.116,09 | 2.836.506,50 | 3.065.084,73 | 0    |

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu persentase jumlah total nilai produksi perikanan kabupaten dalam satuan rupiah per tahun terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran tahun N-1.

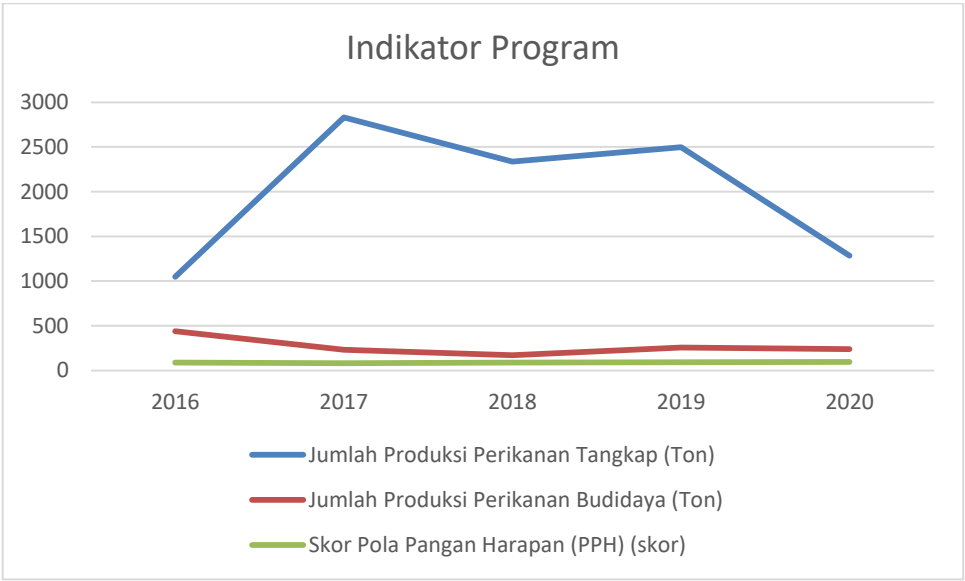
Tabel 13 Perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja                          | Realisasi  |            |            |            |            |
|----|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                            | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|    | Indikator Sasaran                          |            |            |            |            |            |
| 1  | Persentase Kontribusi Sektor Perikanan (%) | 1,74       | 3,95       | 3,35       | 3,25       | 2,32       |
| 2  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)      | 87,10      | 82,00      | 89,50      | 93,20      | 94,50      |
|    | Indikator Program                          |            |            |            |            |            |
| 1  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)    | 1049,49    | 2830,00    | 2336,95    | 2497,36    | 1.282,55   |
| 2  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)   | 438,92     | 233,10     | 172,73     | 256,77     | 239,96     |
| 3  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)      | 87,10      | 82,00      | 89,50      | 93,20      | 94,50      |

Apabila disajikan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Realisasi Kinerja Perbandingan Indikator Sasaran Tahun 2016-2020



Gambar 4 Grafik Realisasi Kinerja Perbandingan Indikator Program Tahun 2016-2020

Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

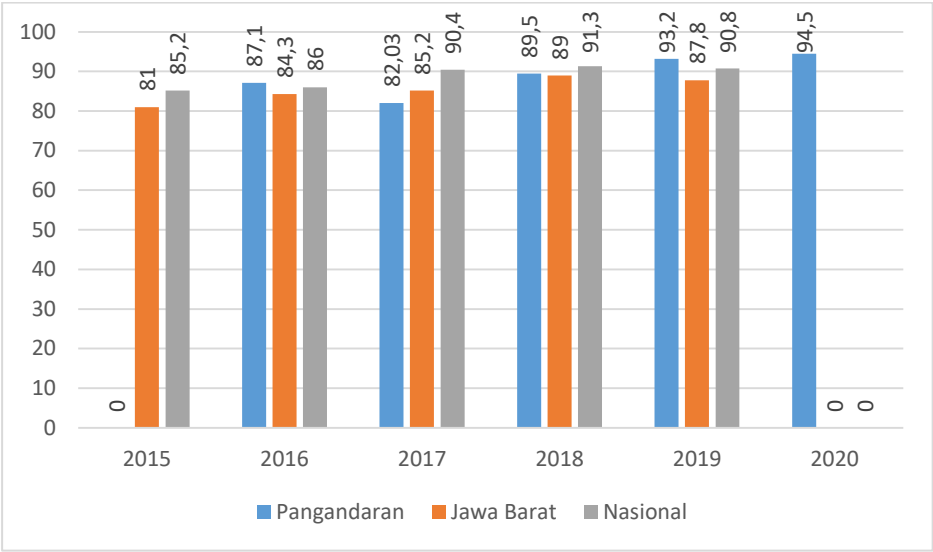
| No | Indikator Kinerja              | Capaian (%) |            |            |            |            |
|----|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                | Tahun 2016  | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 97,87       | 96,47      | 101,70     | 102,42     | 100,53     |

Sebagai bahan perbandingan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pangandaran dengan Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

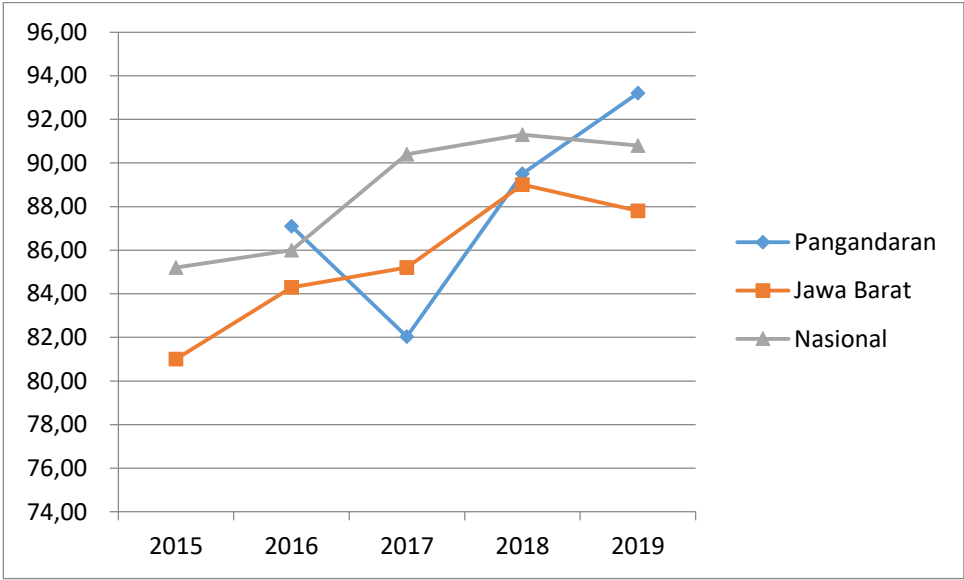
Tabel 15. Tabel Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 s.d 2020

| No | Skor PPH    | Poin  |       |       |       |       |       |
|----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1  | Pangandaran | -     | 87,10 | 82,03 | 89,50 | 93,20 | 94,50 |
| 2  | Jawa Barat  | 81,00 | 84,30 | 85,20 | 89,00 | 87,80 | **    |
| 3  | Nasional    | 85,20 | 86,00 | 90,40 | 91,30 | 90,80 | **    |

Ket : 0 = data belum tersedia ; \*\* = angka target

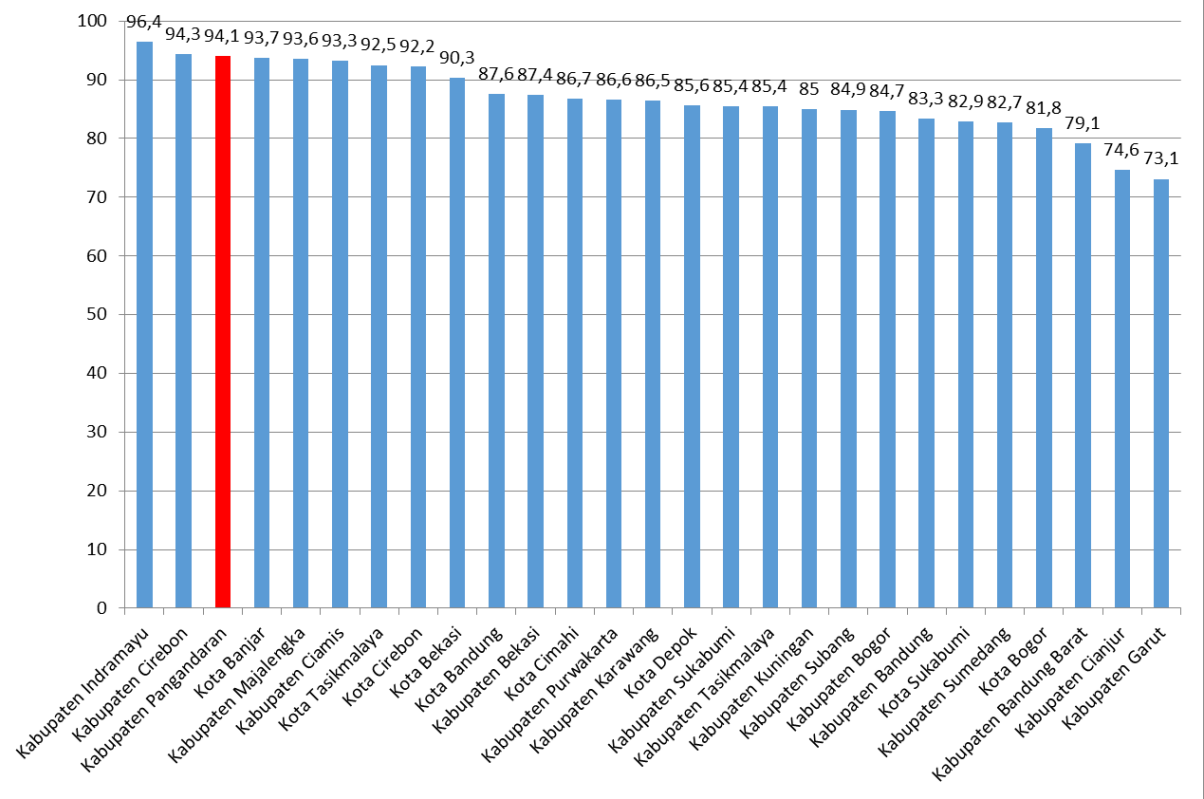


Gambar 5 Time Series Skor Pola Pangan Harapan  
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan Nasional



Gambar 6 Grafik Skor PPH Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat  
dan Nasional Tahun 2015 - 2019

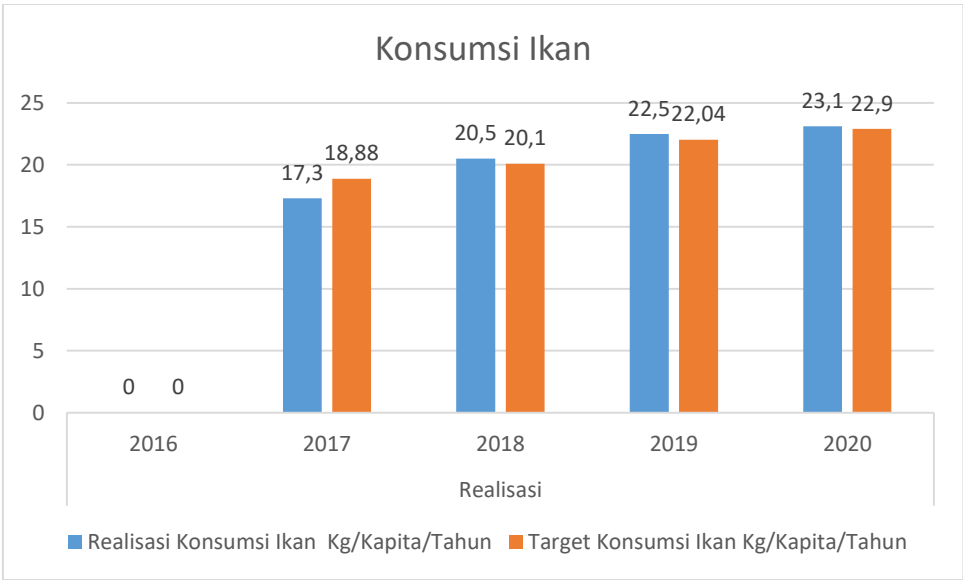
Pada grafik diatas menunjukan bahwa proyeksi Skor PPH Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2019 diatas provinsi Jawa Barat maupun Nasional.



Gambar 7 Grafik Skor PPH Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 16. Tabel Target dan realisasi Konsumsi Ikan Tahun 2016 s.d 2020

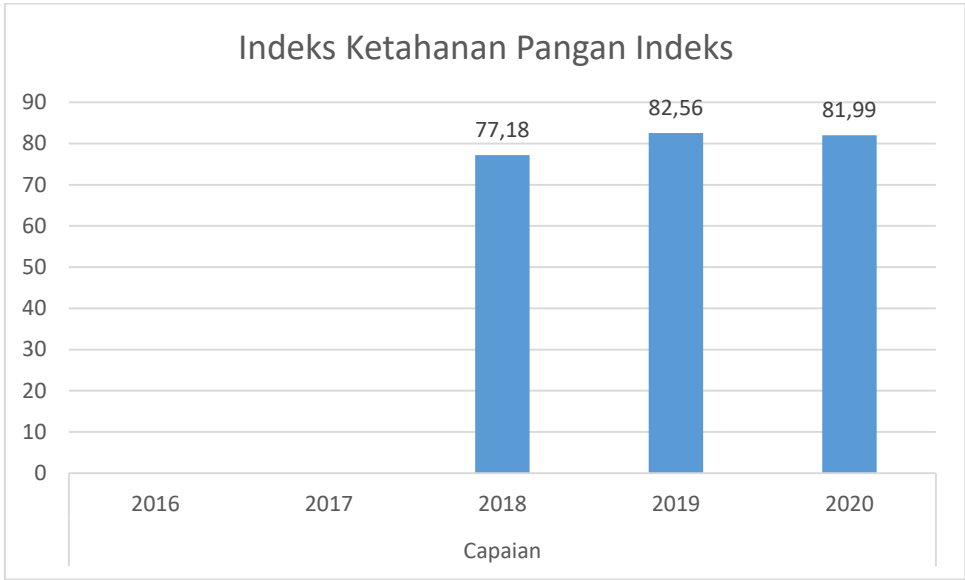
| Indikator               | Satuan           | Realisasi |       |      |       |      |
|-------------------------|------------------|-----------|-------|------|-------|------|
|                         |                  | 2016      | 2017  | 2018 | 2019  | 2020 |
| Realisasi Konsumsi Ikan | Kg/Kapita /Tahun | 0         | 17,3  | 20,5 | 22,5  | 23,1 |
| Target Konsumsi Ikan    | Kg/Kapita /Tahun | 0         | 18,88 | 20,1 | 22,04 | 22,9 |



Gambar 8 Grafik Konsumsi Ikan Tahun 2016 s.d 2020

Tabel 17. Tabel Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2016 s.d 2020

| Indikator               | Satuan | Capaian |      |       |       |       |
|-------------------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|
|                         |        | 2016    | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
| Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 0       | 0    | 77,18 | 82,56 | 81,99 |



Gambar 9 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2016 s.d 2020

Tabel 18. Tabel Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d 2020

| Indikator              | Satuan | Capaian |            |               |               |               |
|------------------------|--------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |        | 2016    | 2017       | 2018          | 2019          | 2020          |
| Pendapatan Asli Daerah | Rp     | 0       | 20.400.000 | 2.530.435.718 | 2.739.599.947 | 2.028.552.462 |



Gambar 10 Grafik Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d 2020

## **2.2 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah;
  - b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;
  - c. penyelenggaraan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
  - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap,

- perikanan budidaya dan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan umum dinas dan standar pelayanan minimal;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Dinas (SPD) serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
  - d. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan, berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas;
  - e. membuat rencana induk pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
  - f. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
  - g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;
  - h. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan lingkup perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
  - i. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas;
  - j. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang perikanan tangkap,

- perikanan budidaya dan ketahanan pangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
  - l. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;
  - m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  - n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
  - p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
  - r. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
  - s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
  - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - u. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan

- x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala Dinas, membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya; dan
- d. Bidang Ketahanan Pangan.

#### Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

(3) Uraian tugas sekretaris meliputi:

- a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), penyusunan indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin), standar operasional prosedur (sop), standar pelayanan (sp) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan dinas yang bersumber dari bidang;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- i. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- n. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- o. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;

- q. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
  - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - s. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  - t. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan agar terwujud tertib administrasi;
  - u. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - v. menyelenggarakan pembinaan arsiparis;
  - w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
  - x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi dinas;
  - y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
  - aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan;
  - bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Sekretaris, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Program dan Keuangan.

## Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian meliputi:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
  - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
  - e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas.
  - f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh dinas;

- g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
- i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
- j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
- m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin / tugas belajar;
- o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan rencana anggaran dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian program dan keuangan;
  - f. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- g. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - h. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian Program dan keuangan meliputi:
- a. menyusun rencana kerja subbagian program dan keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
  - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
  - d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
  - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
  - g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
  - h. melaksanakan akuntansi keuangan;
  - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
  - j. melaksanakan administrasi penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
  - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
  - m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
  - n. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - o. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
  - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dinas;

- q. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis dan/atau pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- r. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada dinas;
- s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- u. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusun rencana kerja dinas;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) dinas;
- x. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

- dd.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- hh.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  - b. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  - c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  - d. pelaksanaan fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan dan/atau rehabilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;

- e. pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
  - f. pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
  - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
  - b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

#### Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data pemberdayaan nelayan kecil;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayan kecil;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan bagi nelayan kecil;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
  - f. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi bagi nelayan kecil;
  - g. penyusunan dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil;

- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil;
- i. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan nelayan kecil;
- j. melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan;
- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
- l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi perikanan tangkap di lapangan;
- n. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  - c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
  - d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pemberdayaan kelembagaan TPI;

- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pembangunan/ rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana TPI;
- g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, perikanan budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - c. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik;
  - d. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
- b. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi pembudidaya ikan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidaya ikan;
  - g. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha kecil pembudidaya ikan;
  - h. pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPI dan TPKPIH;
  - c. pelaksanaan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
  - d. pelaksanaan penyediaan pakan ikan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;
  - f. pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang baik;

- g. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- h. pelaksanaan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban usaha perikanan;
- i. pelaksanaan perencanaan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil;
- j. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:
  - a. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
  - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan.

#### Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan ketersediaan pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - f. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - g. melakukan penyiapan pemanfaatan ketersediaan pangan pemerintah kabupaten;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

#### Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan;

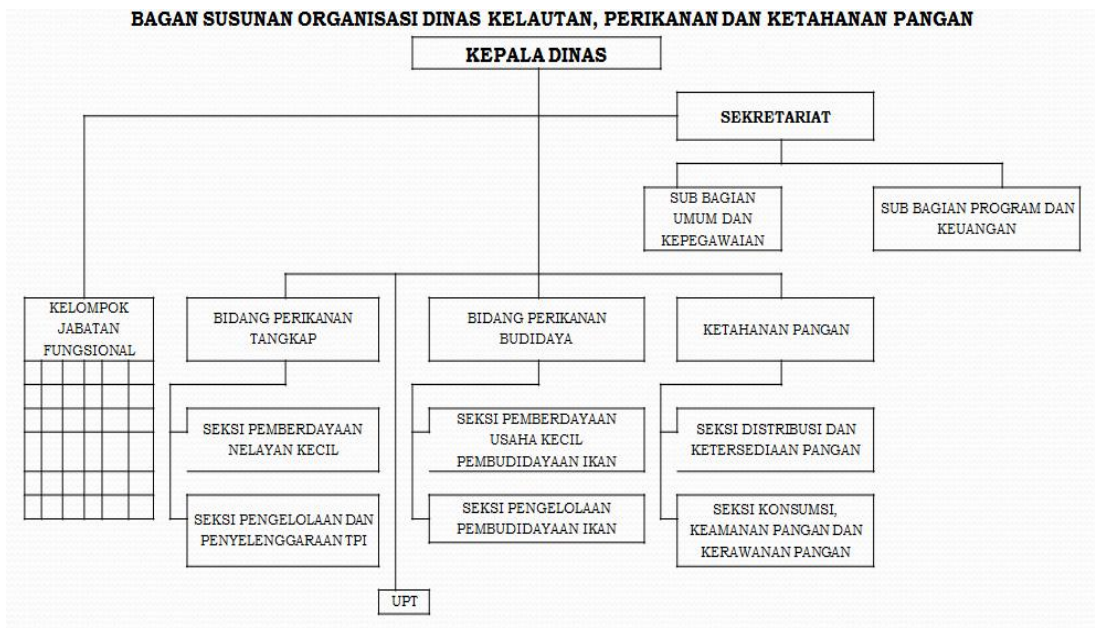
- (2) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - i. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - j. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
  - k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - l. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

- m.melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Konsumsi. Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- n.melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada point (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok dimaksud pada point (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada point (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**2.1.2 Susunan Organisasi**



## 2.3 Sumberdaya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebanyak 23 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan

a. Golongan IV sebanyak 3 orang, terdiri dari :

- Golongan IV/a = 2 orang
- Golongan IV/b = 1 orang
- Golongan IV/c = 0 orang

b. Golongan III sebanyak 18 orang, terdiri dari :

- Golongan III/a = 7 orang
- Golongan III/b = 3 orang
- Golongan III/c = 5 orang
- Golongan III/d = 3 orang

c. Golongan II sebanyak 2 orang, terdiri dari :

- Golongan II/b = 0 orang
- Golongan II/c = 1 orang
- Golongan II/d = 1 orang

2) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

a. Pascasarjana (S2) sebanyak 3 orang

b. Sarjana (S1) sebanyak 15 orang

c. Diploma sebanyak 3 orang

d. SMA/ sederajat sebanyak 2 orang

3) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Eselon

a. Eselon II sebanyak 0 orang

b. Eselon III sebanyak 4 orang

c. Eselon IV sebanyak 8 orang

d. Non eselon sebanyak 11 orang

4) Unit Usaha Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Selain sumberdaya manusia Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan juga memiliki sumberdaya berupa unit usaha yang terdiri dari :

a. 1 unit Balai Benih Ikan

b. 10 unit Tempat Pelelangan Ikan tersebar di 5 kecamatan

5) Aset/Modal Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya sumberdaya yang dimiliki Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu berupa aset/modal. Sumberdaya berupa aset tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 19. Aset di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran**

| No     | Uraian                      | Nilai Aset     |
|--------|-----------------------------|----------------|
| 1      | Tanah                       | 6.346.224.236  |
| 2      | Peralatan dan Mesin         | 4.505.968.563  |
| 3      | Gedung dan Bangunan         | 22.567.298.551 |
| 4      | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.727.755.000  |
| 5      | Aset Tetap lainnya          | 29.350.000     |
| 6      | Aset Lainnya                | 38.514.316.251 |
| Jumlah |                             | 74.690.912.601 |

Sumber: Laporan Keuangan DKPKP Tahun 2019

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan ditunjukkan dari capaian kinerja berdasarkan sasaran renstra periode sebelumnya. Dinas Kelautan perikanan dan ketahanan pangan melaksanakan 2 urusan pemerintahan, terdiri dari urusan wajib pangan dan urusan pilihan kelautan dan perikanan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan melalui tabel T.C.23 (Lampiran 1).

Tabel T.C. 23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

| No                                         | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                     | Target NSPK | Target IKU | Target Indikator Lainnya                                          | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       |       |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|------|------|------|------|
|                                            |                                                                                |             |            |                                                                   | 1                                        | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                          | 2     | 3     | 4     | 5    | 1                               | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1)                                        | (2)                                                                            | (3)         | (4)        | (5)                                                               | (6)                                      | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                       | (12)  | (13)  | (14)  | (15) | (16)                            | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1                                          | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |             |            | Cakupan layanan administrasi perkantoran (persen)                 | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 88    | 90    | 98    |      |                                 | 88   | 90   | 98   |      |
| 2                                          | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |             |            | Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik (persen)       | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 98    | 95    | 98    |      |                                 | 98   | 95   | 98   |      |
| 3                                          | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |             |            | Tingkat disiplin aparatur (persen)                                | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 90    | 90    | 90    |      |                                 | 90   | 90   | 90   |      |
| 4                                          | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |             |            | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik (persen) | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 98    | 100   | 100   |      |                                 | 98   | 100  | 100  |      |
| Persentase Kontribusi sektor Perikanan (%) |                                                                                |             | 2,20       |                                                                   |                                          | 2,05  | 2,10  | 2,15  | 2,20  |                            | 4,09  | 3,25  | 2,32  |      |                                 | 200  | 155  | 108  |      |
| 1                                          | Program pengembangan perikanan tangkap                                         |             |            | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                           | 2.830                                    | 2.833 | 2.840 | 2.843 | 2.845 | 2.830                      | 2.337 | 2.497 | 1.283 |      |                                 | 82   | 88   | 45   |      |
| 2                                          | Program pengembangan budidaya perikanan                                        |             |            | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                          | 95                                       | 98    | 101   | 104   | 107   | 233                        | 173   | 257   | 240   |      |                                 | 176  | 254  | 231  |      |
| Skor Pola Pangan Harapan (Skor)            |                                                                                |             | 97         |                                                                   |                                          | 88    | 91    | 94    | 97    |                            | 89,50 | 93,20 | 94,50 |      |                                 | 102  | 102  | 101  |      |
| 1                                          | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                           |             |            | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (point)                            | 85                                       | 88    | 91    | 94    | 97    | 82                         | 90    | 93    | 95    |      |                                 | 102  | 102  | 101  |      |

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat diinterpretasikan melalui rasio antara realisasi dan penganggaran periode sebelumnya. Untuk melihat rasio

antara realisasi dan anggaran disajikan pada Tabel T.C 24 (Lampiran 2).

Tabel T.C. 24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat  
Daerah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pangandaran

| Uraian                                                                           | Anggaran pada tahun ke |               |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke |               |               |               |   | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%) |    |     |     |   | Rata-rata Pertumbuhan |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----------------------|---------------|--------|
|                                                                                  | 1                      | 2             | 3             | 4             | 5             | 1                                | 2             | 3             | 4             | 5 | 1                                                | 2  | 3   | 4   | 5 | Anggaran              | Realisasi     | (%)    |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                       | 465.162.000            | 378.722.900   | 357.159.000   | 326.914.687   |               | 432.186.350                      | 359.092.482   | 350.784.768   | 321.701.629   | - | 93                                               | 95 | 98  | 98  |   | - 46.082.438          | - 36.828.240  | 79,92  |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | 222.060.000            | 237.700.000   | 73.165.000    | 182.558.500   |               | 218.936.610                      | 217.476.500   | 71.633.000    | 182.137.800   | - | 99                                               | 91 | 98  | 100 |   | - 13.167.167          | - 12.266.270  | 93,16  |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                            | 3.000.000              | -             | -             | 0             |               | 3.000.000                        | -             | -             | -             | - | 100                                              | -  | -   | -   |   | -                     | -             | 0,00   |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                            | 140.123.000            | 136.360.000   | 118.727.000   | 125.630.362   |               | 138.691.363                      | 132.437.300   | 118.550.900   | 125.338.000   | - | 99                                               | 97 | 100 | -   |   | - 4.830.879           | - 4.451.121   | 92,14  |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |                        |               |               |               | 2.799.488.998 |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   |                       |               |        |
| Program pengembangan perikanan tangkap                                           | 1.657.715.000          | 2.431.649.000 | 873.617.000   | 3.098.029.700 |               | 1.393.979.073                    | 2.383.970.650 | 793.704.080   | 3.053.417.070 | - | 84                                               | 98 | 91  | 99  |   | - 414.428.750         | - 348.494.768 | 84,09  |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                            |                        |               |               |               | 1.341.699.700 |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   |                       |               |        |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                            |                        |               |               |               | 5.205.000     |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   |                       |               |        |
| Program pengembangan budidaya perikanan                                          | 195.133.000            | 914.188.000   | 2.111.071.000 | 1.727.436.700 |               | 179.670.564                      | 870.594.900   | 2.070.374.645 | 1.671.779.080 | - | 92                                               | 95 | 98  | 97  |   | 510.767.900           | 497.369.505   | 97,38  |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                           |                        |               |               |               | 1.588.111.800 |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   | -                     | -             |        |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                             | 669.257.000            | 212.960.000   | 771.450.000   | 96.658.100    |               | 643.474.125                      | 210.684.648   | 764.427.900   | 96.217.300    | - | 96                                               | 99 | 99  | 100 |   | - 190.866.300         | - 182.418.942 | 95,57  |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN |                        |               |               |               | 500.000.000   |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   | -                     | -             |        |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                |                        |               |               |               | 545.036.654   |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   | -                     | -             |        |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                              |                        |               |               |               | 86.843.100    |                                  |               |               |               |   |                                                  |    |     |     |   | -                     | -             |        |
| Jumlah                                                                           | 3.352.450.000          | 4.311.579.900 | 4.305.189.000 | 5.557.228.049 | 6.866.385.252 | 3.009.938.085                    | 4.174.256.480 | 4.169.475.293 | 5.450.590.879 | - |                                                  | 97 | 97  | 98  | - | 878.483.813           | - 752.484.521 | -85,66 |

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan lima tahun ke depan.

Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan dan alat penangkapan terlarang;
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain di sebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang di bangun;
3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;

4. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan dimana masih banyak penggunaan formalin atau bahan tambahan terlarang lainnya yang digunakan sebagai bahan pengawet produk perikanan.
5. Aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada didaratan maupun sepanjang pesisir pantai dan dilautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan lima tahun ke depan antara lain :

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting;
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlunya didukung munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar.
3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan;
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menghadapi beberapa permasalahan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Analisis Lingkungan Internal (ALI).**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, akan dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk mempengaruhinya.

##### **A. Analisis Kekuatan (*Strenghts*)**

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 31/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Pemekaran SKPD dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan menjadi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan akan memberikan kekuatan dan peluang yang lebih besar untuk mewujudkan keinginan dalam melayani masyarakat;
- b. Garis pantai sepanjang 91 km yang memiliki potensi seperti memiliki sumber air yang cukup melimpah dan memiliki wilayah strategis sebagai potensi perikanan budidaya dan penangkapan ikan;
- c. Sebagai daerah yang memiliki wilayah dataran tinggi dan rendah memiliki pantai panjang ditunjang oleh potensi pariwisata menjadikan ketersediaan pangan masyarakat dan diversifikasi pangan masyarakat cukup kuat;

- d. Pembangunan sector kelautan, perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang tinggi dalam aspek dukungan masyarakat dalam menunjang fisik;
- e. Kebijakan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang memprioritaskan pembangunan untuk mencapai tingkat disparitas wilayah yang rendah. Dengan prioritas kebijakan ini berarti alokasi pembangunan lebih di tingkatkan termasuk di dalamnya sector kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan, karena mayoritas mata pencaharian penduduk bergantung pada pertanian, hasil laut dan perikanan sehingga sector ini yang mempunyai daya ungkit/dongkrak yang penting bagi peningkatan ekonomi penduduk;
- f. Tumbuhnya kelompok masyarakat atau stakeholder yang ikut berperan dalam pelestarian dan pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti adanya POLTEK, UNPAD dan UIN Sunan Gunung Jati;
- g. Dengan semakin banyak pihak yang ikut berperan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan maka tingkat keberhasilan pembangunan menjadi lebih tinggi dan lebih akuntabel. Sehingga lulusan dari Sekolah tinggi yang telah disebutkan di atas bisa disalurkan dan mengurangi angka pengangguran.

#### **B. Analisis Kelemahan (Weakness)**

- a. Keterbatasan petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasi. Petugas yang menduduki jabatan bukan berlatar belakang pendidikan teknis sehingga tingkat pengetahuan dan kemampuannya terbatas. Jumlah staf dan petugas teknis di lapangan masih sangat kurang;
- b. Masih kurangnya/buruknya infrastruktur dasar bidang kelautan perikanan dan ketahanan pangan;
- c. Sumber daya manusia bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan kemandirian, mampu berdaya saing dan berkualitas;

- d. Dengan masih terbatasnya kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan membuat penerapan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan skala usaha bidang kelautan dan perikanan menjadi terbatas sehingga hasil yang diinginkan belum optimal;
- e. Program kemitraan dengan masyarakat belum berjalan baik di bidang urusan kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
- f. Keterbatasan Dana  
Keterbatasan dana menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan menjadi terbatas sehingga keinginan masyarakat belum dapat terpenuhi semuanya;
- g. Kelembagaan Ketahanan Pangan belum cukup kuat  
Ketahanan Pangan sebagai urusan non wajib non pelayanan dasar perlu ditangani dengan kelembagaan yang kuat yang mampu memberikan arahan kebijakan strategis yang kuat dan terarah.

## **2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)**

### **A. Peluang (*Opportunity*)**

- a. Terbukanya pasar.  
Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar untuk menghasilkan produksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar/masyarakat. Untuk itu pengembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting.
- b. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar.

Dengan potensi luas lahan budidaya, luas perairan umum serta laut yang menjadi wewenang daerah dan tenaga kerja yang ada maka sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dijadikan sumber penggerak ekonomi daerah.

- c. Program pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang dilaksanakan di daerah.

Dengan adanya program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran maka akan mendukung percepatan pembangunan perikanan daerah melalui industrialisasi berbasis *blue economy* yang secara teknologi maupun pendanaan tidak dimiliki oleh daerah. Serta lulusan POLTEK dan UNPAD dapat berkontribusi dalam memajukan program tersebut, karena mereka generasi muda yang mempunyai ide cemerlang dan hidup di era milenial yang tahu akan teknologi di masa yang akan datang.

#### **B. Tantangan (*Threat*)**

- a. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan  
Upaya peningkatan produksi perikanan dan kelautan saat ini terkendala oleh penurunan daya dukung lingkungan perairan, baik untuk usaha budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Hal ini selain disebabkan oleh *over exploitasi* juga dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan perairan akibat aktifitas industri dan rumah tangga di hulu maupun di wilayah pesisir.
- b. Adanya ancaman hama penyakit, bencana alam dan pelanggaran peraturan perundangan perikanan.  
Hama penyakit pada budidaya perikanan, bencana banjir, badai dan fenomena *up-welling* yang biasanya terjadi di waduk serta pelanggaran terhadap perahu contohnya area dan alat tangkap perikanan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produksi perikanan budidaya maupun tangkap.
- c. Pasar (Pemasaran)  
Para pembudidaya sangat mengalami kerugian pada saat stok hasil tangkap atau hasil budidaya tidak bisa langsung terjual ke konsumen, dikarenakan belum

optimalnya pemasaran harus di salurkan kemana dan kesiapa. Serta penyimpanan yang terlalu lama di pembudidaya menyebabkan kualitas produk akan menurun sehingga pemasaran terhadap konsumen ikun menurun.

- d. Keterbatasan penggunaan teknologi perikanan.
  - e. Pangan sebagai kebutuhan asasi, mendapatkan ancaman serius menghadapi banyaknya alih fungsi lahan pertanian pangan, sebagai dampak dari pembangunan.
- Disisi lain kebutuhan pangan di kabupaten Pangandaran tidak hanya diperuntukan untuk penyediaan konsumsi penduduk, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan untuk wisatawan.
- f. Masih tingginya konsumsi beras, terigu, dan minyak dalam konsumsi masyarakat Pangandaran.
  - g. Masuknya produk impor.

Analisis S W O T

Tabel 20. Tabel Analisis SWOT

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div> | <div>STENGTH (S)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda Nomor 31/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran</li> <li>Kebijakan RPJPD dan RJPMD untuk mencapai tingkat disparitas wilayah yang rendah</li> <li>Tumbuhnya kelompok masyarakat yang ikut berperan dalam pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan</li> </ul> | <div>WEAKNESS (W)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan petugas teknis, baik dalam jumlah maupun kualifikasi</li> <li>Kualitas pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang masih rendah</li> <li>Keterbatasan Dana</li> </ul> |
|                                          | <div>OPPORTUNITY (O)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbukanya pangsa pasar</li> <li>Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <div>STRATEGI (SO)</div> <div>rantai pasar ikan dan pelelangan ikan berbasis teknologi informasi, pengelolaan perikanan berbasis kawasan</div> <div>STRATEGI (WO)</div> <div>Penyediaan sarana/prasarana perikanan dan pengawasan sdy perikanan.</div>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah</li> </ul>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |
| <p><b><u>THREATS (T)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan</li> <li>Adanya hama penyakit, bencana alam dan pelanggaran hukum kelautan dan perikanan</li> <li>Masuknya produk impor</li> </ul> | <p><b><u>STRATEGI (ST)</u></b></p> <p>Peningkatan konsumsi ikan, peningkatan ketahanan pangan daerah, penanganan daerah rawan pangan, pengawasan pangan, penganeekaragaman pangan</p> | <p><b><u>STRATEGI (WT)</u></b></p> <p>fasilitasi/pemberian bantuan premi asuransi perikanan (Asin Dara).</p> |

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Dari analisa SWOT tersebut diatas maka strategi yang dipilih yang merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konsumsi ikan, Upaya peningkatan konsums ikan masyarakat melalui kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)
2. Peningkatan Ketahanan Pangan daerah, Melalui peningkatan konsumsi protein dan energi, penyedian Cadangan Pangan Daerah (CPD), KRPL dan P2L serta Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Juara)
3. Penanganan Daerah Rawan Pangan, Melalui penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Intervensi Daerah Terkena Rawan Pangan
4. Pengawasan Pangan, Upaya peningkatan keamanan pangan dan penyediaan pangan yang aman melalui pemantauan dan pengambilan sample tes pangan
5. Penganeekaragaman Pangan, Upaya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui kampanye konsumsi pangan secara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)
6. Penyediaan sarana/prasarana perikanan dan pengawasan sdy perikanan, Pemberian Bantuan Sarana/Prasaran Perikanan untuk memaksimalkan produksi perikanan daerah dalam rangka peningkatan PAD dan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

denga cara memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan optimal dan berkelanjutan/lestari

7. Fasilitasi/Pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan (Asin Dara), Fasilitasi/Pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan melalui Program Inovasi ASIN DARA (Asuransi Perikanan Pangandaran Juara)
8. Rantai Pasar Ikan Dan Pelelangan Ikan Berbasis Teknologi Informasi, Penyediaan rantai pemasaran ikan melalui Pasar Ikan Modern/Outlet Perikanan Desa/TOKO IKAN JUARA (1 desa 1 outlet) serta peningkatan pelayanan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berbasis IT (e-TPI)
9. Pengelolaan Perikanan Berbasis Kawasan, Penyelenggaraan Perikanan Berbasis Kawasan melalui penyediaan/penataan Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Komoditi, Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Wisata serta Kawasan Nelayan/Kampung Nelayan berbasis Wisata (Kampung Nelayan Juara)

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Dalam rangka perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah perlu penelaahan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terhadap pelayanan perangkat daerah.

#### **3.2.1 Visi Kabupaten Pangandaran**

Visi Jangka Menengah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah :

“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA  
YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”

#### **3.2.2 Misi Kabupaten Pangandaran**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pangandaran 2021 – 2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Pangandaran 2021 – 2026 adalah :

**Misi Pertama:** Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama. Maksudnya adalah Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat

Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

**Misi Kedua:** Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan. Maksudnya Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

**Misi Ketiga:** Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan. Dimaksudkan merupakan bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau *human resource* akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

**Misi Keempat:** Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Maksudnya adalah Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

**Misi Kelima:** mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel. Dimaksudkan untuk Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

**Misi Keenam:** Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk

mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

### 3.2.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 21. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran**

| No | Misi                                                                                                                                                                             | Tujuan                                                                                                 | Sasaran                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama                                                                                 | Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal                           |                                                                                                                             | Indeks Kesalehan Sosial                                      |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama | Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                             | Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa                            |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa                                                                               | Indeks Desa Membangun                                        |
| 2  | Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan                                                                                                          | Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal |                                                                                                                             | Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata   |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata                                                                       | Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan                              |
| 3  | Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing                                     |                                                                                                                             | Indeks Pembangunan Manusia                                   |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                             | Indeks Pembangunan Gender                                    |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif                                | Indeks Kesehatan                                             |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                             | Indeks Pendidikan                                            |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                             | Indeks Pembangunan Literas Masyarakat                        |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi                                                                                      | Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan               |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | Melambatnya laju pertumbuhan penduduk                                                                                       | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk                         |
| 4  | Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang                                                                                                                                   | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor                                                                |                                                                                                                             | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                     |
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                             | Persentase Penduduk Miskin                                   |

| No | Misi                                                                                                            | Tujuan                                                                                            | Sasaran                                                                                           | Indikator Kinerja                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal                                                                              | Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.                                                 | Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                                                  | PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun) |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Persentase Realisasi Nilai Investasi                                 |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Rasio Kewirausahaan                                                  |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Indeks Ketahanan Pangan                                              |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatnya permukiman layak huni                                                                | Persentase Rumah Layak Huni                                          |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja                                                 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                         |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatnya cakupan penanganan PPKS                                                              | Persentase PPKS yang Mandiri                                         |
| 5  | Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel                                   | Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) | Indeks Reformasi Birokrasi                                           |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Nilai SAKIP                                                          |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Tingkat Maturitas SPIP                                               |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Indeks SPBE                                                          |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                   |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Indeks Profesionalitas ASN                                           |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif                                   | Indeks Pelayanan Publik                                              |
| 6  | Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan | Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana                   |                                                                                                   | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur                                |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah                               | Indeks Konektivitas Wilayah                                          |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                   | Persentase cakupan layanan infrastruktur                             |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah                                                    | Indeks Kapasitas Daerah                                              |
|    |                                                                                                                 |                                                                                                   | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup                                                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                     |

Dilihat dari Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pangandaran di atas, yang menjadi fokus bagi Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu pada Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan social yang berkeadilan berbasis potensi lokal, Tujuannya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat, Sasaran Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, Indikator sasaran nya adalah PDRB Perkapita dan Indeks Ketahanan Pangan.

Untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran kabupaten dengan tujuan, sasaran dan pagu

perangkat daerah maka dapat ditampilkan melalui pohon kinerja pada tabel 3.2 sebagai lampiran 3.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dalam rangka sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah maka dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Selanjutnya terdapat 9 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tranfromasi pelayanan publik.

Sector kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan ada di dalam agenda pembangunan nasional pada no 1. Yaitu

memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Sedangkan Visi Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) merupakan penjabaran dari visi nasional yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SEJAHTERA DAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Terdapat 4 misi KKP yang merupakan penjabaran dari misi nasional diantaranya:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan bersaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Sedangkan Visi Jawa Barat untuk tahun 2018-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”

Selanjutnya terdapat 5 misi Jawa Barat yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang InovatifMewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diarahkan untuk:

1. Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.
2. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, lahan hutan dan pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Jawa Barat dan rencana pembangunan Tahun 2019-2029, dengan lintas sektoral, lintas wilayah pusat/provinsi/kabupaten/kota, yang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.
4. Peningkatan tertib ruang melalui inovasi dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya terdapat sembilan (9) prioritas pembangunan provinsi jawa barat yang terdiri dari :

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara

6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Program Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yaitu Nelayan Juara. Nelayan juara diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan di Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, serta menjaga kelestarian laut dan kawasan pesisir melalui:

1. Peningkatan jaminan ketersediaan benih berkualitas;
2. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana, serta teknologi kelautan dan perikanan; dan
4. Peningkatan produksi dan nilai tambah kelautan dan perikanan.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan renstra. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan maka Kebijakan Nasional yang berkaitan langsung adalah Peningkatan Kemandirian Jawa Barat Dalam Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan. Sedangkan prioritas pembangunan Jawa Barat yang dijadikan acuan adalah prioritas nomor 3 (yaitu) yaitu Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04 Ha atau 20,10% kedua untuk lahan kebun yaitu seluas kurang lebih 24.917 ha atau sekitar 16,58% yang berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha atau sekitar 16,42% dari total penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran.

Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 22. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran**

| No                 | Penggunaan Lahan            | Luas (Ha)         |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1                  | Irigasi teknis              | 9.651,00          |
| 2                  | Irigasi setengah teknis     | 3.578,98          |
| 3                  | Irigasi sederhana PU        | 1.950,00          |
| 4                  | Irigasi sederhana Non PU    | -                 |
| 5                  | Tadah hujan                 | 8.906,00          |
| 6                  | Pasang surut                | 9,00              |
| 7                  | Lebak                       | 607,00            |
| 8                  | Rawa                        | -                 |
| 9                  | Pekarangan dan bangunan     | 24.678,00         |
| 10                 | Tegal/kebun/ladang/huma     | 24.917,00         |
| 11                 | Penggembalaan/padang rumput | 1.758,00          |
| 12                 | Sementara tidak diusahakan  | 9.031,00          |
| 13                 | Hutan Rakyat                | 30.202,04         |
| 14                 | Hutan Negara                | 17.047,56         |
| 15                 | Hutan Mangrove              | 310,00            |
| 16                 | Perkebunan negara/swasta    | 4.342,35          |
| 17                 | Rawa yang ditanamai         | -                 |
| 18                 | Tambak                      | -                 |
| 19                 | Kolam/empang                | 13.272,00         |
| 20                 | Lain-lain                   | -                 |
| <b>Grand Total</b> |                             | <b>150.259,93</b> |

*Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026*

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Adapun isu-isu strategis yang teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ketidakpastian produksi perikanan tangkap.
- 2) Terdapat praktek Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, dan kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap masih belum memadai
- 4) Keterbatasan Sumberdaya Nelayan.
- 5) Rendahnya kapasitas usaha penangkapan ikan para nelayan.
- 6) Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas sehingga perlu operasionalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dalam rangka memenuhi ketersediaan benih dan induk ikan yang berkualitas.
- 7) Potensi pengembangan pasar ikan dalam rangka pengelolaan dan manajemen pemasaran hasil budidaya perikanan.
- 8) Informasi harga pasar benih dan ikan konsumsi air tawar belum stabil, sehingga perlu standarisasi harga oleh instansi terkait

- 9) Peningkatan kapasitas produksi ikan melalui bantuan benih ikan, pakan dan penataan kelompok.
- 10) Pemberdayaan kelompok perikanan melalui pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan.
- 11) Menurunnya populasi ikan dan udang di perairan umum sehingga perlu dilakukan restocking ikan/udang di perairan umum
- 12) Pengembangan kapasitas kelompok dalam rangka ketersediaan pakan ikan mandiri melalui pelatihan dan bantuan sarana pembuatan pakan ikan.
- 13) Di musim penghujan yang terus menerus semua pembudidaya berhati-hati timbulnya penyakit, upayakan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lingkungan
- 14) Lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah
- 15) Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga diperlukannya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
- 16) Mengatasi lemahnya koordinasi lintas sektor melalui peningkatan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.
- 17) Mengatasi tingginya prosentase penduduk rawan pangan dengan meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di lingkungan.
- 18) Pemantauan harga dan pasokan pangan pokok secara berkelanjutan untuk mengatasi fluktuasi harga.
- 19) Mengatasi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras melalui percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
- 20) Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal dalam rangka mengatasi ketergantungan pada pangan impor/luar daerah.
- 21) Masih ditemukannya ketidakamanan pangan sehingga perlu penguatan dan pembinaan keamanan pangan.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan jangka menengah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan periode tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kesejahteraan pelaku utama perikanan dan Terwujudnya ketahanan pangan daerah

Sasaran jangka menengah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan pangan periode tahun 2021-2026 terdiri dari Meningkatkan produktivitas perikanan dan Mewujudkan ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Periode Tahun 2021-2026 di tampilkan pada Tabel T.C 25 sebagaimana berikut.

Tabel 23. Tabel T.C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

| No | Tujuan                                                                                   | Indikator                                                          | Target Kinerja |               |               |               |               |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                                                                          |                                                                    | Awal           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| 1. | Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                                         | Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Miliar Rupiah) | 71,12          | 71,41         | 71,76         | 72,2          | 72,7          | 73,28         | 73,94         |
|    |                                                                                          | Indeks Ketahanan Pangan (point)                                    | 81,99          | 82            | 82,5          | 83            | 83,5          | 84            | 84,5          |
| 2. | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Nilai SAKIP                                                        | 66,73          | 66,90 - 67,15 | 67,25 - 69,00 | 69,25 - 72,00 | 72,25 - 76,00 | 76,25 - 81,00 | 81,25 - 85,00 |

| No | Sasaran                                           | Indikator                                     | Target Kinerja |       |       |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                   |                                               | Awal           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1. | Meningkatkan produktivitas perikanan              | Persentase peningkatan produksi perikanan (%) | n/a            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   |
| 2. | Meningkatkan ketahanan pangan berbasis masyarakat | Skor pola pangan harapan (Skor)               | 94             | 70    | 75    | 80    | 85    | 90    | 95    |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP          | Nilai LHE AKIP DKPKP                          | 89,90          | 89,91 | 89,92 | 89,93 | 89,94 | 89,95 | 89,96 |

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang cukup relevan, cepat, tepat dan akurat serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang diuraikan dalam berbagai Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

Tabel T.C 26

**Tabel 24. Tabel T.C 26 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan  
Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan**

|                                                                                                  |                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : “PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA" |                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal       |                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tujuan                                                                                           | Sasaran                              | Strategi                                                              | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan                                                 | Meningkatkan produktivitas perikanan | a. Penyediaan sarana/prasarana perikanan dan pengawasan SDY perikanan | a. Pemberian Bantuan Sarana/Prasaran Perikanan untuk memaksimalkan produksi perikanan daerah dalam rangka peningkatan PAD dan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB denga cara memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan optimal dan berkelanjutan/lestari |
|                                                                                                  |                                      | b. Fasilitasi/pemberian bantuan premi asuransi perikanan (Asin dara)  | b. Fasilitasi/Pemberian Bantuan Premi Asuransi Perikanan melalui Program Inovasi ASIN DARA (Asuransi Perikanan Pangandaran Juara)                                                                                                                                          |
|                                                                                                  |                                      | c. Rantai pasar ikan dan pelelangan ikan berbasis teknologi informasi | c. Penyediaan rantai pemasaran ikan melalui Pasar Ikan Modern/Outlet Perikanan Desa/TOKO IKAN JUARA (1 desa 1 outlet) serta peningkatan pelayanan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berbasis IT (e-TPI)                                                                   |

| Tujuan | Sasaran                                         | Strategi                                  | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                 | d. Pengelolaan perikanan berbasis kawasan | d. Penyelenggaraan Perikanan Berbasis Kawasan melalui penyediaan/penataan Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Komoditi, Kawasan Budidaya Ikan Berbasis Wisata serta Kawasan Nelayan/Kampung Nelayan berbasis Wisata (Kampung Nelayan Juara) |
|        | Mewujudkan ketahanan pangan berbasis masyarakat | a. Peningkatan konsumsi ikan              | a. Upaya peningkatan konsumsi ikan masyarakat melalui kampanye Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)                                                                                                                                            |
|        |                                                 | b. Peningkatan ketahanan pangan daerah    | b. Melalui peningkatan konsumsi protein dan energi, penyediaan Cadangan Pangan Daerah (CPD), KRPL dan P2L serta Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Juara)                                                           |
|        |                                                 | c. Penanganan daerah rawan pangan         | c. Melalui penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Intervensi Daerah Terkena Rawan Pangan                                                                                                                                                 |
|        |                                                 | d. Pengawasan pangan                      | d. Upaya peningkatan keamanan pangan dan penyediaan pangan yang aman melalui pemantauan dan pengambilan sample tes pangan                                                                                                              |
|        |                                                 | e. Penganekaragaman pangan                | e. Upaya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui kampanye konsumsi pangan secara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)                                                                                                   |

| Visi : “PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA"             |                                                                                          |                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis potensi local |                                                                                          |                                       |                                        |
| Tujuan                                                                                                       | Sasaran                                                                                  | Strategi                              | Arah Kebijakan                         |
| Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan                              | Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | a. Pengawasan internal secara berkala | a. Peningkatan pemahaman tentang SAKIP |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| publik yang<br>prima |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan di atas disusun dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Pangandaran. Diharapkan pelaksanaan kebijakan Perangkat Daerah dapat diwujudkan sehingga visi dan misi Kabupaten dapat tercapai.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel T.C 33 (lampiran 5).

Untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan selama lima (5) tahun dilakukan dengan pelaksanaan 9 program dan 31 Kegiatan diantaranya sebagai berikut;

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

### 3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

### 4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

### 5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

### 6. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

### 7. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

### 8. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam pelaksanaannya harus disertai dengan rencana pendanaan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Penentuan pendanaan diuraikan untuk penentuan 6 tahun sebagai berikut:

- Tahun Pertama (Tahun 2021) Rp 13.891.411.307,00
- Tahun Kedua (Tahun 2022) Rp 50.414.222.778,00
- Tahun Ketiga (Tahun 2023) Rp 45.512.837.658,00
- Tahun Keempat (Tahun 2024) Rp 48.659.528.771,00
- Tahun Kelima (Tahun 2025) Rp 53.253.515.846,00
- Tahun Keenam (Tahun 2026) Rp 58.122.388.007,00

Penentuan pendapatan diuraikan untuk penentuan 6 tahun sebagai berikut:

| No       | Uraian                  | Proyeksi       |                |                |                |                |                |
|----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                         | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| 1        | Pendapatan Daerah       |                |                |                |                |                |                |
| 01:01    | Pendapatan Asli Daerah  |                |                |                |                |                |                |
| 01:01:02 | Retribusi Daerah        | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.600.000.000  | 2.600.000.000  | 2.700.000.000  | 2.700.000.000  |
| 2        | Belanja Daerah          |                |                |                |                |                |                |
| 02:01    | Belanja Operasi         | 13.891.411.307 | 50.414.222.778 | 45.512.837.658 | 48.659.528.771 | 53.253.515.846 | 58.122.388.007 |
| 02:01:01 | Belanja Pegawai         | 3.106.793.319  | 3.339.856.651  | 4.097.126.879  | 4.248.648.356  | 4.519.295.513  | 4.764.582.084  |
| 02:01:02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.784.617.988 | 47.074.366.127 | 41.415.710.779 | 44.410.880.415 | 48.734.220.333 | 53.357.805.923 |

| Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 – 2026<br>(Dinas Kelautan,Perikanan dan Ketahanan Pangan) |    |     |  |                                                                                 |                                                                 |                         |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                            |                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Kode                                                                                                                                                                                         |    |     |  | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                             | Data Kinerja Awal RPJMD | 2021   |                   | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024   |                   | 2025   |                   | 2026   |                   | Kondisi Kinerja pada akhir |                   | Perangkat Daerah Penanggung           |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 |                                                                 |                         | Target | Rp.               | Target | Rp.               | Target | Rp.               | Target | Rp.               | Target | Rp.               | Target | Rp.               | Target                     | Rp.               |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 |                                                                 |                         | 1      | 2                 | 3      | 4                 | 5      | 6                 | 7      | 8                 | 9      | 10                | 11     | 12                | 13                         | 14                |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  | Urusan Wajib Pangan                                                             |                                                                 |                         |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                            |                   |                                       |
| 2                                                                                                                                                                                            | 9  | 0'2 |  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan             | 51%                     | 0      | -                 | 8%     | 5.750.000.000,00  | 8%     | 6.325.000.000,00  | 8%     | 6.957.500.000,00  | 8%     | 7.653.250.000,00  | 8%     | 8.418.575.000,00  | 8%                         | 8.418.575.000,00  | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan |
| 2                                                                                                                                                                                            | 9  | 0'3 |  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | 1. Angka Kecukupan Energi                                       | 2150                    | 2100   | 102.762.500       | 2100   | 2.180.000.000,00  | 2100   | 2.398.000.000,00  | 2100   | 2.637.800.000,00  | 2100   | 2.901.580.000,00  | 2100   | 3.191.738.000,00  | 2100                       | 3.191.738.000,00  | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 | 2. Angka Kecukupan Protein                                      | 57                      | 57     |                   | 57     |                   | 57     |                   | 57     |                   | 57     |                   | 57     |                   |                            |                   |                                       |
| 2                                                                                                                                                                                            | 9  | 0'4 |  | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)                    | 5,38                    | 0,05   | 102.572.500       | 5%     | 480.000.000,00    | 4%     | 528.000.000,00    | 3%     | 580.800.000,00    | 2%     | 638.880.000,00    | 1%     | 702.768.000,00    | 1%                         | 702.768.000,00    | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan |
| 2                                                                                                                                                                                            | 9  | 0'5 |  | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Persentase pangan segar aman                                    | N/A                     | 0      | -                 | 55%    | 150.000.000,00    | 60%    | 165.000.000,00    | 65%    | 181.500.000,00    | 70%    | 199.650.000,00    | 75%    | 219.615.000,00    | 75%                        | 219.615.000,00    | Dinas Keluatan, Perikanan, dan Pangan |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  | Urusan Pemerintah Pilihan Kelautan Dan Perikanan                                |                                                                 |                         |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                            |                   |                                       |
| X                                                                                                                                                                                            | XX | 1   |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | 1. 90%                  | 1. 90% | 3.783.694.557     | 1. 90% | 4.212.064.013,00  | 1. 90% | 5.122.279.752,00  | 1. 90% | 5.362.186.807,00  | 1. 90% | 5.694.598.111,00  | 1. 90% | 5.961.617.753,00  | 1. 90%                     | 5.961.617.753,00  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | 2. 90%                  | 2. 90% |                   | 2. 90% |                   | 2. 90% |                   | 2. 90% |                   | 2. 90% |                   | 2. 90% |                   |                            |                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   | 3. 90%                  | 3. 90% |                   | 3. 90% |                   | 3. 90% |                   | 3. 90% |                   | 3. 90% |                   | 3. 90% |                   |                            |                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 4. 90%                  | 4. 90% |                   | 4. 90% |                   | 4. 90% |                   | 4. 90% |                   | 4. 90% |                   | 4. 90% |                   |                            |                   |                                       |
| 3                                                                                                                                                                                            | 25 | 3   |  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                           | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap               | -11,62%                 | 0,30%  | 9.533.163.000     | 0,30%  | 21.713.000.000,00 | 0,30%  | 21.169.500.000,00 | 0,30%  | 23.286.450.000,00 | 0,30%  | 25.615.095.000,00 | 0,30%  | 28.176.604.500,00 | 0,30%                      | 28.176.604.500,00 | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
| 3                                                                                                                                                                                            | 25 | 5   |  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                           | Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan        | N/A                     | 5%     | 13.995.000        | 5%     | 2.280.774.000,00  | 5%     | 2.508.851.400,00  | 5%     | 2.759.736.540,00  | 5%     | 3.035.710.194,00  | 5%     | 3.339.281.213,00  | 5%                         | 3.339.281.213,00  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
| 3                                                                                                                                                                                            | 25 | 4   |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                          | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya              | -24,45%                 | 0,20%  | 355.223.750       | 0,20%  | 12.580.000.000,00 | 0,20%  | 6.154.760.500,00  | 0,20%  | 5.674.051.900,00  | 0,20%  | 6.211.853.555,00  | 0,20%  | 6.803.586.575,50  | 0,20%                      | 6.803.586.575,50  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
| 3                                                                                                                                                                                            | 25 | 6   |  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan   | N/A                     | 0      | -                 | 90%    | 1.068.384.765,00  | 90%    | 1.141.446.006,00  | 90%    | 1.219.503.524,00  | 90%    | 1.302.898.986,00  | 90%    | 1.308.601.965,00  | 90%                        | 1.308.601.965,00  | Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan |
| Jumlah Anggaran                                                                                                                                                                              |    |     |  |                                                                                 |                                                                 |                         |        | 13.891.411.307,00 |        | 50.414.222.778,00 |        | 45.512.837.658,00 |        | 48.659.528.771,00 |        | 53.253.515.846,00 |        | 58.122.388.006,50 |                            | 58.122.388.006,50 |                                       |

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai komitmen dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasara RPJMD 6 tahun yang akan datang maka Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan telah menetapkan Indikator-indikator yang dapat menunjukkan kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel T-C.28. sebagai berikut.

**Tabel 25. Tabel T.C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO | INDIKATOR<br>TUJUAN<br>DAN<br>SASARAN                                 | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada Awal<br>Periode<br>RPJMD |                  | Target           |                  |                  |                  |                  |                  | Kondisi<br>Kinerja<br>Pada<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                       | Tahun 0                                             | Tahun 1          | Tahun 2          | Tahun 3          | Tahun 4          | Tahun 5          | Tahun 6          |                  |                                                         |
|    | TUJUAN                                                                |                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                         |
| 1  | Kontribusi<br>Produksi<br>sector<br>perikanan<br>terhadap<br>PDRB (%) | 71,12                                               | 71,41            | 71,76            | 72,2             | 72,7             | 73,28            | 73,94            | 73,94            |                                                         |
| 2  | Indeks<br>Ketahanan<br>Pangan<br>(point)                              | 81,99                                               | 81               | 81,5             | 82               | 82,5             | 83               | 83,5             | 83,5             |                                                         |
| 3  | Nilai SAKIP                                                           | 66,73                                               | 66,90 -<br>67,15 | 67,25 -<br>69,00 | 69,25 -<br>72,00 | 72,25 -<br>76,00 | 76,25 -<br>81,00 | 81,25 -<br>85,00 | 81,25 -<br>85,00 |                                                         |
|    | SASARAN                                                               |                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                         |
| 1  | Persentase<br>peningkata<br>n produksi<br>perikanan<br>(%)            | n/a                                                 | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5              | 0,5              |                                                         |
| 2  | Skor pola<br>pangan<br>harapan<br>(Skor)                              | 94                                                  | 70               | 75               | 80               | 85               | 90               | 95               | 95               |                                                         |
| 3  | Nilai LHE<br>AKIP<br>DKPKP                                            | 89,90                                               | 89,91            | 89,92            | 89,93            | 89,94            | 89,95            | 89,96            | 89,96            |                                                         |

Indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran diatas selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana pada lampiran 4.

Dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka disusunlah keterkaitan indikator kinerja antar esselon pada Dinas Kelautan

Periklanan dan Ketahanan Pangan berupa pohon kinerja sebagaimana lampiran 3.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis dinas yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan dijalankannya renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari stakeholders pembangunan kelautan dan perikanan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan kelautan dan perikanan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Forum SKPD, *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomani Renstra Dinas dan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Cijulang, 3 September 2021  
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan  
dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pangandaran



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
Pembina, IV/a

NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel TC.23  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017-2021**

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                     | Target NSPK | Target IKU | Target Indikator Lainnya                                          | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       |       |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke (%) |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                |             |            |                                                                   | 1                                        | 2     | 3     | 4     | 5     | 1                          | 2     | 3     | 4     | 5    | 1                               | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                                            | (3)         | (4)        | (5)                                                               | (6)                                      | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                       | (12)  | (13)  | (14)  | (15) | (16)                            | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |             |            | Cakupan layanan administrasi perkantoran (persen)                 | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 88    | 90    | 98    |      |                                 | 88   | 90   | 98   |      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |             |            | Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik (persen)       | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 98    | 95    | 98    |      |                                 | 98   | 95   | 98   |      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |             |            | Tingkat disiplin aparatur (persen)                                | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 90    | 90    | 90    |      |                                 | 90   | 90   | 90   |      |
| 4   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |             |            | Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik (persen) | 100                                      | 100   | 100   | 100   | 100   |                            | 98    | 100   | 100   |      |                                 | 98   | 100  | 100  |      |
|     | Persentase Kontribusi sektor Perikanan                                         |             | 2,20       |                                                                   |                                          | 2,05  | 2,10  | 2,15  | 2,20  |                            | 4,09  | 3,25  | 2,32  |      |                                 | 200  | 155  | 108  |      |
| 1   | Program pengembangan perikanan tangkap                                         |             |            | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                           | 2.830                                    | 2.833 | 2.840 | 2.843 | 2.845 | 2.830                      | 2.337 | 2.497 | 1.283 |      | 100                             | 82   | 88   | 45   |      |
| 2   | Program pengembangan budidaya perikanan                                        |             |            | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                          | 95                                       | 98    | 101   | 104   | 107   | 233                        | 173   | 257   | 240   |      | 245                             | 176  | 254  | 231  |      |
|     | Skor Pola Pangan Harapan (Skor)                                                |             | 97         |                                                                   |                                          | 88    | 91    | 94    | 97    |                            | 89,50 | 93,20 | 94,50 |      |                                 | 102  | 102  | 101  |      |
| 1   | Program Peningkatan Ketahanan Pangan                                           |             |            | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (point)                            | 85                                       | 88    | 91    | 94    | 97    | 82                         | 90    | 93    | 95    |      | 96                              | 102  | 102  | 101  |      |

Cijulang, 3 September 2021

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan  
dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pangandaran



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel TC. 24  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN  
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN ANGGARAN 2017-2021

| Uraian                                                                 | Anggaran pada tahun ke |             |             |             |   | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke |             |             |             |   | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%) |     |     |     |   | Rata-rata Pertumbuhan |              |         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------|--------------|---------|
|                                                                        | 1                      | 2           | 3           | 4           | 5 | 1                                | 2           | 3           | 4           | 5 | 1                                                | 2   | 3   | 4   | 5 | Anggaran              | Realisasi    | (%)     |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 465.162.000            | 378.722.900 | 357.159.000 | 326.914.687 |   | 432.186.350                      | 359.092.482 | 350.784.768 | 321.701.629 | - | 93                                               | 95  | 98  | 98  |   | - 46.082.438          | - 36.828.240 | 79,92   |
| Penyediaan jasa surat menyurat                                         | 2.700.000              | 1.500.000   | 1.500.000   | 2.700.000   |   | 2.700.000                        | 1.500.000   | 1.500.000   | 2.700.000   |   | 100                                              | 100 | 100 | 100 |   | -                     | -            | 0,00    |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik               | 35.000.000             | 33.500.000  | 42.400.000  | 43.907.973  |   | 24.568.131                       | 26.427.058  | 37.631.144  | 41.953.715  |   | 70                                               | 79  | 89  | 96  |   | 2.969.324             | 5.795.195    | 195,17  |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 22.000.000             | 8.500.000   | 6.000.000   | 7.600.000   |   | 15.226.114                       | 4.881.500   | 5.358.700   | 6.377.700   |   | 69                                               | 57  | 89  | 84  |   | - 4.800.000           |              | #VALUE! |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor                                      | 11.254.000             | 18.100.000  | 18.700.000  | 21.700.000  |   | 10.650.000                       | 18.096.400  | 18.675.300  | 21.696.700  |   | 95                                               | 100 | 100 | 100 |   | 3.482.000             | 3.682.233    | 105,75  |
| Penyediaan jasa pengamanan kantor                                      | 16.454.000             | 32.700.000  | 32.400.000  | 31.487.700  |   | 14.550.000                       | 32.200.000  | 32.400.000  | 31.487.700  |   | 88                                               | 98  | 100 | 100 |   | 5.011.233             | 5.645.900    | 112,66  |
| Penyediaan jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga        | 50.868.000             | 33.650.000  | 21.400.000  | 30.088.124  |   | 47.629.860                       | 33.638.124  | 21.389.124  | 29.098.124  |   | 94                                               | 100 | 100 | 97  |   | - 6.926.625           | - 6.177.245  | 89,18   |
| Penyediaan alat tulis kantor                                           | 87.783.000             | 90.772.900  | 69.459.000  | 69.604.390  |   | 87.783.000                       | 90.772.900  | 69.459.000  | 69.604.390  |   | 100                                              | 100 | 100 | 100 |   | - 6.059.537           | - 6.059.537  | 100,00  |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 19.800.000             | 15.000.000  | 14.000.000  | 13.851.200  |   | 19.152.000                       | 14.217.200  | 13.926.000  | 13.821.200  |   | 97                                               | 95  | 99  | 100 |   | - 1.982.933           | - 1.776.933  | 89,61   |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | 4.888.000              | 3.000.000   | 2.000.000   | 5.029.000   |   | 4.888.000                        | 2.110.000   | 1.998.000   | 5.027.500   |   | 100                                              | 70  | 100 | 100 |   | 47.000                | 46.500       | 98,94   |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 24.001.500             | 12.000.000  | 10.100.000  | 10.060.000  |   | 19.623.500                       | 10.460.000  | 9.360.000   | 9.060.000   |   | 82                                               | 87  | 93  | 90  |   | - 4.647.167           | - 3.521.167  | 75,77   |
| Penyediaan makanan dan minuman                                         | 38.000.000             | 30.000.000  | 27.000.000  | 19.835.000  |   | 36.413.500                       | 25.008.500  | 26.968.500  | 19.827.000  |   | 96                                               | 83  | 100 | 100 |   | - 6.055.000           | - 5.528.833  | 91,31   |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | 142.413.500            | 100.000.000 | 90.000.000  | 48.551.300  |   | 141.622.245                      | 99.780.800  | 89.919.000  | 48.547.600  |   | 99                                               | 100 | 100 | 100 |   | - 31.287.400          | - 31.024.882 | 99,16   |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah                     | 10.000.000             | -           | -           | -           |   | 7.380.000                        |             |             | -           |   | 74                                               | -   | -   | -   |   | -                     | -            | 0,00    |
| Penyediaan Jasa Pengemudi                                              |                        |             | 22.200.000  | 22.500.000  |   |                                  |             | 22.200.000  | 22.500.000  |   | -                                                | -   | 100 | 100 |   | 300.000               | 300.000      | 100,00  |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | 222.060.000            | 237.700.000 | 73.165.000  | 182.558.500 |   | 218.936.610                      | 217.476.500 | 71.633.000  | 182.137.800 | - | 99                                               | 91  | 98  | 100 |   | - 13.167.167          | - 12.266.270 | 93,16   |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                   | 51.000.000             | 45.400.000  | -           | 61.093.800  |   | 50.000.000                       | 42.400.000  | -           | 61.093.800  |   | 98                                               | 93  | -   | 100 |   | 3.364.600             | 3.697.933    | 109,91  |
| Pengadaan peralatan gedung kantor                                      | 20.000.000             | 22.000.000  | 5.600.000   | 12.000.000  |   | 20.000.000                       | 17.000.000  | 5.600.000   | 12.000.000  |   | 100                                              | 77  | 100 | 100 |   | - 2.666.667           | - 2.666.667  | 100,00  |
| Pengadaan mebeleur                                                     | 39.370.000             | 46.000.000  | 2.000.000   | -           |   | 39.312.000                       | 46.000.000  | 2.000.000   | -           |   | 100                                              | 100 | 100 | -   |   | - 13.123.333          | - 13.104.000 | 99,85   |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | 11.690.000             | 17.000.000  | 6.500.000   | 8.707.500   |   | 11.690.000                       | 16.582.000  | 6.440.000   | 8.707.300   |   | 100                                              | 98  | 99  | 100 |   | - 994.167             | - 994.233    | 100,01  |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 45.000.000             | 50.000.000  | 46.465.000  | 58.727.200  |   | 43.647.610                       | 41.453.000  | 45.156.000  | 58.686.700  |   | 97                                               | 83  | 97  | 100 |   | 4.575.733             | 5.013.030    | 109,56  |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                  | 5.000.000              | 7.000.000   | 2.600.000   | 7.485.000   |   | 4.287.000                        | 5.461.500   | 2.490.000   | 7.465.000   |   | 86                                               | 78  | 96  | 100 |   | 828.333               | 1.059.333    | 127,89  |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                     | 3.000.000              | 4.500.000   | 1.000.000   | 4.945.000   |   | 3.000.000                        | 2.780.000   | 947.000     | 4.585.000   |   | 100                                              | 62  | 95  | 93  |   | 648.333               | 528.333      | 81,49   |
| Pengadaan komputer                                                     | 47.000.000             | 45.800.000  | 9.000.000   | 29.600.000  |   | 47.000.000                       | 45.800.000  | 9.000.000   | 29.600.000  |   | 100                                              | 100 | 100 | 100 |   | - 5.800.000           | - 5.800.000  | 100,00  |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | 3.000.000              | -           | -           | 0           |   | 3.000.000                        | -           | -           | -           | - | 100                                              | -   | -   | -   |   | -                     | -            | 0,00    |
| Pengadaan mesin/kartu absensi                                          | 3.000.000              | -           | -           | 0           |   | 3.000.000                        | -           | -           | -           | - | 100                                              | -   | -   | -   |   | -                     | -            | 0,00    |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | 140.123.000            | 136.360.000 | 118.727.000 | 125.630.362 |   | 138.691.363                      | 132.437.300 | 118.550.900 | 125.338.000 | - | 99                                               | 97  | 100 | -   |   | - 4.830.879           | - 4.451.121  | 92,14   |

[illegible]

|                                                                                                                    |               |               |             |               |            |               |               |             |               |   |     |     |     |     |  |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|--|---------------|---------------|--------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |               |             |               | 39.370.799 |               |               |             |               |   |     |     |     |     |  |               |               |        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |               |             |               | 91.268.838 |               |               |             |               |   |     |     |     |     |  |               |               |        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |               |             |               | 50.629.400 |               |               |             |               |   |     |     |     |     |  |               |               |        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |               |               |             |               | 4.529.000  |               |               |             |               |   |     |     |     |     |  |               |               |        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |               |               |             |               | 5.498.000  |               |               |             |               |   |     |     |     |     |  |               |               |        |
| Program pengembangan perikanan tangkap                                                                             | 1.657.715.000 | 2.431.649.000 | 873.617.000 | 3.098.029.700 |            | 1.393.979.073 | 2.383.970.650 | 793.704.080 | 3.053.417.070 | - | 84  | 98  | 91  | 99  |  | - 414.428.750 | - 348.494.768 | 84,09  |
| Pengadaan Barang Cetakan ( Karcis Lelang )                                                                         | 107.400.000   |               |             |               |            | 105.748.726   |               |             |               |   | 98  | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan                                                                                | 987.132.000   |               |             |               |            | 986.337.500   |               |             |               |   | 100 | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi TPI Pangandaran                                                               | 95.933.000    |               |             |               |            | 94.097.850    |               |             |               |   | 98  | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Detail Enginerig Design (DED) Concrete Break Water / Revetment Legokjawa                                           | 45.000.000    |               |             |               |            | -             |               |             |               |   | -   | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Detail Enginerig Design (DED) Revetment Pantai Batukaras                                                           | 45.000.000    |               |             |               |            | -             |               |             |               |   | -   | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Detail Engineering Design (DED) Revetment Pantai Pamugaran Pangandaran                                             | 45.000.000    |               |             |               |            | -             |               |             |               |   | -   | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Detail Engineering Design (DED) TPI Batukaras                                                                      | 45.000.000    |               |             |               |            | 43.189.300    |               |             |               |   | 96  | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Detail Engineering Design (DED) TPI Bojongsalawe                                                                   | 45.000.000    |               |             |               |            | 43.046.322    |               |             |               |   | 96  | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Monitoring Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI                                                                     | 18.300.000    |               |             |               |            | 12.329.500    |               |             |               |   | 67  | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan                                                       | 40.000.000    |               |             |               |            | 40.000.000    |               |             |               |   | 100 | -   | -   | -   |  |               |               |        |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI                                                                                |               | 172.000.000   | 205.200.000 | 177.732.500   |            |               | 170.449.600   | 140.259.000 | 177.142.500   |   | -   | 99  | 68  | 100 |  | 2.866.250     | 3.346.450     | 0,00   |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Nelayan                                                                   | 78.950.000    | 85.233.000    | 72.750.000  | 281.157.000   |            | 69.229.875    | 78.994.350    | 72.430.300  | 280.072.800   |   | 88  | 93  | 100 | 100 |  | 67.402.333    | 70.280.975    | 104,27 |
| Pembangunan TPI Pangandaran (Lanjutan)                                                                             |               | 585.000.000   |             |               |            |               | 583.324.200   |             |               |   | -   | 100 | -   | -   |  | -             | -             | 0,00   |
| Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bojongsalawe                           |               | 1.397.916.000 |             |               |            |               | 1.369.702.000 |             |               |   | -   | 98  | -   | -   |  | -             | -             | 0,00   |
| Pengadaan Lahan Rumah Nelayan                                                                                      |               |               | 120.850.000 |               |            |               |               | 115.847.880 |               |   | -   | -   | 96  | -   |  | -             | -             | 0,00   |
| Pemeliharaan Berkala TPI                                                                                           |               |               | 20.000.000  |               |            |               |               | 19.897.000  |               |   | -   | -   | 99  | -   |  | -             | -             | 0,00   |
| Pembangunan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT                                            |               |               | 223.417.000 |               |            |               |               | 218.381.000 |               |   | -   | -   | 98  | -   |  | -             | -             | 0,00   |

|                                                                                                                                               |             |             |               |               |               |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|-----|----|-----|-----|--|--------------|--------------|--------|
| Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap                                                                               |             | 59.500.000  | 110.000.000   |               |               |             | 56.755.000  | 108.300.000   |               |   | -   | 95 | 98  | -   |  | 50.500.000   | 51.545.000   | 102,07 |
| Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan                                                                                                       |             | -           | -             | 1.890.750.200 |               |             |             |               | 1.879.598.800 |   | -   | -  | -   | 99  |  | -            | -            | 0,00   |
| Pameran dan Promosi                                                                                                                           | 105.000.000 | 84.500.000  | 90.000.000    | 31.595.000    |               | 101.933.000 | 81.324.000  | 89.932.600    | 31.595.000    |   | 97  | 96 | 100 | 100 |  | - 24.468.333 | - 23.446.000 | 95,82  |
| Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)                                                                                            |             | 47.500.000  | 31.400.000    |               |               |             | 43.421.500  | 28.656.300    |               |   |     | 91 | 91  | -   |  | - 16.100.000 | - 14.765.200 | 91,71  |
| Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan                                                                                 |             |             |               | 18.804.000    |               |             |             |               | 17.975.000    |   |     | -  | -   | 96  |  | -            | -            | 0,00   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK)                                                                   |             |             |               | 634.491.000   |               |             |             |               | 603.532.970   |   |     | -  | -   | 95  |  | -            | -            | 0,00   |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI (19)                                                                                                      |             |             |               | 63.500.000    |               |             |             |               | 63.500.000    |   |     | -  | -   | 100 |  | -            | -            | 0,00   |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                  |             |             |               |               | 1.341.699.700 |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                |             |             |               |               | 41.000.000    |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                  |             |             |               |               | 848.950.000   |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                        |             |             |               |               | 240.935.000   |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                          |             |             |               |               | 33.000.900    |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                        |             |             |               |               | 177.813.800   |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                  |             |             |               |               | 5.205.000     |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |             |             |               |               | 5.205.000     |             |             |               |               |   |     |    |     |     |  |              |              |        |
| <b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>                                                                                                | 195.133.000 | 914.188.000 | 2.111.071.000 | 1.727.436.700 |               | 179.670.564 | 870.594.900 | 2.070.374.645 | 1.671.779.080 | - | 92  | 95 | 98  | 97  |  | 510.767.900  | 497.369.505  | 97,38  |
| Intensifikasi Balai Benih Ikan Cimerak                                                                                                        | 110.133.000 | 89.375.000  | 148.440.000   |               |               | 110.025.564 | 86.092.300  | 146.849.000   |               |   | 100 | 96 | 99  | -   |  | 19.153.500   | 18.411.718   | 96,13  |
| Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Cimerak                                                                                                      |             |             |               | 70.548.000    |               |             |             |               | 70.528.500    |   | -   | -  | -   | 100 |  | -            | -            | 0,00   |
| Detail Engineering Design (DED) Pengelolaan Irigasi Partisipasi (PITAP)                                                                       | 35.000.000  |             |               |               |               | 25.734.000  |             |               |               |   | 74  | -  | -   | -   |  | -            | -            | -      |
| Detail Engineering Design (DED) Jalan Produksi Budidaya                                                                                       | 50.000.000  |             |               |               |               | 43.911.000  |             |               |               |   | 88  | -  | -   | -   |  | -            | -            | -      |
| Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan                                                                          |             | 130.743.000 |               |               |               |             | 125.884.500 |               |               |   |     | 96 | -   | -   |  | -            | -            | 0,00   |
| Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Cimerak                                                                        |             |             | 540.975.000   |               |               |             |             | 527.405.600   |               |   |     | -  | 97  | -   |  | -            | -            | 0,00   |
| Percontohan Budidaya Perikanan                                                                                                                |             |             | 759.025.000   |               |               |             |             | 737.576.345   |               |   |     | -  | 97  | -   |  | -            | -            | 0,00   |
| Pengembangan MINAPADI                                                                                                                         |             |             | 129.922.000   |               |               |             |             | 128.916.000   |               |   |     | -  | 99  | -   |  | -            | -            | 0,00   |
| Pengembangan Jalan Produksi                                                                                                                   |             |             | 397.000.000   |               |               |             |             | 396.545.000   |               |   |     | -  | 100 | -   |  | -            | -            | 0,00   |

[illegible]

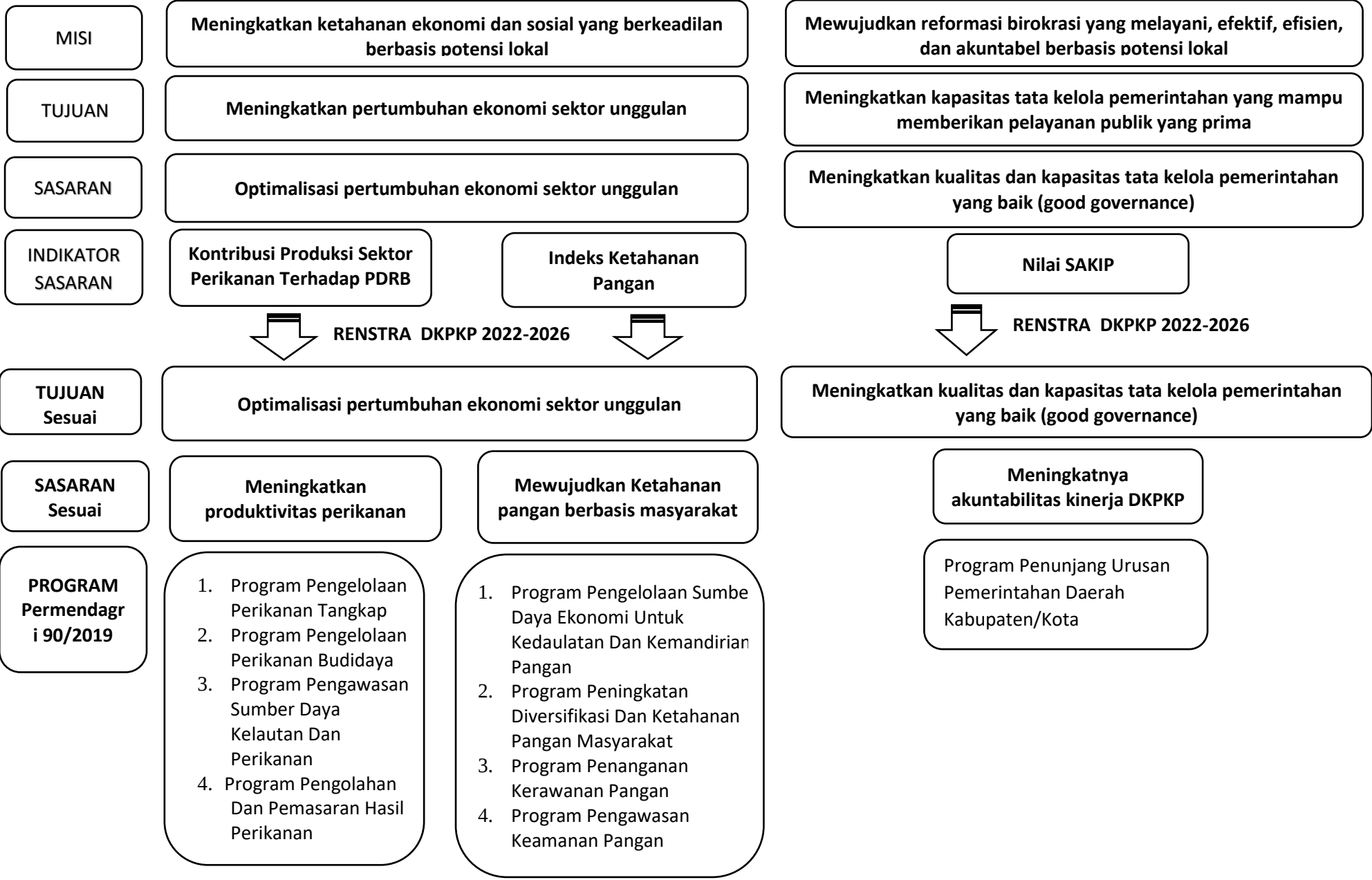
|                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |          |  |           |           |           |          |                    |          |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Penganekaragaman Konsumsi Pangan<br>Berdasarkan Sumber Daya Lokal                                                      |                      |                      |                      |                      | 501.310.054          |                      |                      |                      |                      |          |  |           |           |           |          |                    | -        | -                  |               |
| <b>PROGRAM PENANGANAN<br/>KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                                          |                      |                      |                      |                      | <b>86.843.100</b>    |                      |                      |                      |                      |          |  |           |           |           |          |                    | -        | -                  |               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penanganan Kerawanan Pangan<br>Kabupaten/Kota                                                                            |                      |                      |                      |                      | 12.059.500           |                      |                      |                      |                      |          |  |           |           |           |          |                    | -        | -                  |               |
| Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan,<br>dan Penyaluran Cadangan Pangan<br>pada Kerawanan Pangan yang<br>Mencakup dalam 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |                      |                      |                      |                      | 74.783.600           |                      |                      |                      |                      |          |  |           |           |           |          |                    | -        | -                  |               |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                           | <b>3.352.450.000</b> | <b>4.311.579.900</b> | <b>4.305.189.000</b> | <b>5.557.228.049</b> | <b>6.866.385.252</b> | <b>3.009.938.085</b> | <b>4.174.256.480</b> | <b>4.169.475.293</b> | <b>5.450.590.879</b> | <b>-</b> |  | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>98</b> | <b>-</b> | <b>878.483.813</b> | <b>-</b> | <b>752.484.521</b> | <b>-85,66</b> |



Cijulang, 3 September 2021  
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan  
dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pangandaran

**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19710628 200312 1 005

**POHON KINERJA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022-2026**



Tabel TC.27  
**INDIKATO KINERJA UTAMA**  
**DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**TAHUN 2022-2026**

| URAIAN                                                   |                                                   |                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                  | TARGET KINERJA |       |       |      |      |       |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|                                                          |                                                   |                                                                                        |                                                                    | Awal           | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025  | 2026  |
| TUJUAN: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan |                                                   |                                                                                        | Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Miliar Rupiah) | 71,12          | 71,41 | 71,76 | 72,2 | 72,7 | 73,28 | 73,94 |
|                                                          |                                                   |                                                                                        | Indeks Ketahanan Pangan (Point)                                    | 81,99          | 82    | 82,5  | 83   | 83,5 | 84    | 84,5  |
|                                                          | Sasaran 1.1. Meningkatkan Produktivitas Perikanan |                                                                                        | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)                      | n/a            | 0,5   | 0,3   | 0,5  | 0,5  | 0,5   | 0,5   |
|                                                          |                                                   | Program 1.1.1. Pengelolaan Perikanan Tangkap                                           | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)              | 1282,55 ton    | 0,30  | 0,3   | 0,3  | 0,3  | 0,3   | 0,3   |
|                                                          |                                                   | Program 1.1.2. Pengelolaan Perikanan Budidaya                                          | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)             | 239,96 ton     | 0,20  | 0,2   | 0,2  | 0,2  | 0,2   | 0,2   |
|                                                          |                                                   | Program 1.1.3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                           | Persentase Usaha Perikanan Darat yang memenuhi Ketentuan (%)       | 5%             | 5%    | 5     | 5    | 5    | 5     | 5     |
|                                                          |                                                   | Program 1.1.4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Persentase Penyediaan Pasar Terhadap Poduksi Hasil Perikanan (%)   | 0%             | 0%    | 90    | 90   | 90   | 90    | 90    |
|                                                          | Sasaran 1.2. Mewujudkan Ketahanan Pangan          |                                                                                        | Skor Pola Pangan Harapan (Skor)                                    | 94             | 70    | 75    | 80   | 85   | 90    | 95    |
|                                                          |                                                   | Program 1.2.1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan (%)            | 0              | 8     | 8     | 8    | 8    | 8     | 8     |
|                                                          |                                                   | Program 1.2.2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)                               | 94,5           | 2100  | 2100  | 2100 | 2100 | 2100  | 2100  |
|                                                          |                                                   |                                                                                        | Angka Kecukupan Protein (gr/kapita)                                | n/a            | 57    | 57    | 57   | 57   | 57    | 57    |
|                                                          |                                                   | Program 1.2.3. Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan (%)                            | 5              | 5     | 5     | 4    | 3    | 2     | 1     |

| URAIAN                                                                                           |  |                                                             | INDIKATOR KINERJA                                               | TARGET KINERJA |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                  |  |                                                             |                                                                 | Awal           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|                                                                                                  |  | Program 1.2.4. Pengawasan Keamanan Pangan                   | Persentase Pangan Segar Aman (%)                                | 0              | 0             | 55            | 60            | 65            | 70            | 75            |
| TUJUAN: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) |  |                                                             | Nilai SAKIP                                                     | 66,73          | 66,90 - 67,15 | 67,25 - 69,00 | 69,25 - 72,00 | 72,25 - 76,00 | 76,25 - 81,00 | 81,25 - 85,00 |
|                                                                                                  |  | Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP           | Nilai LHE AKIP DKPKP                                            | 89,9           | 89,91         | 89,92         | 89,93         | 89,94         | 89,95         | 89,96         |
|                                                                                                  |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi            | 1. 90%         | 1. 90%        | 1. 90%        | 1. 90%        | 1. 90%        | 1. 90%        | 1. 90%        |
|                                                                                                  |  |                                                             | 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik             | 2. 90%         | 2. 90%        | 2. 90%        | 2. 90%        | 2. 90%        | 2. 90%        | 2. 90%        |
|                                                                                                  |  |                                                             | 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur                   | 3. 90%         | 3. 90%        | 3. 90%        | 3. 90%        | 3. 90%        | 3. 90%        | 3. 90%        |
|                                                                                                  |  |                                                             | 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas | 4. 90%         | 4. 90%        | 4. 90%        | 4. 90%        | 4. 90%        | 4. 90%        | 4. 90%        |

Cijulang, 3 September 2021  
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan  
dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Pangandaran



**DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel T.C.33  
Rumusan Rencana Strategis Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022-2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
Kabupaten Pangandaran  
SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

| Kode       | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                                                                                                                                                 | Awal                                                       | Rencana Tahun 2021 |                                      |                                 |             |                                      |                             | Rencana Tahun 2022              |                                      |         |                             |                                      |             | Rencana Tahun 2023 |                                      |                                 |             |                                      |                             | Rencana Tahun 2024              |                                      |         |                             |                                      |             | Rencana Tahun 2025 |                                      |                                 |             |                                      |                             | Rencana Tahun 2026              |             |        |  |  |  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | Target                                                     | Lokasi             | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana                          | Lokasi  | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif      | Sumber Dana | Lokasi             | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana                          | Lokasi  | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif      | Sumber Dana | Lokasi             | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi                               | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | Lokasi |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | (1)                                                        | (2)                | (3)                                  | (4)                             | (5)         | (6)                                  | (7)                         | (8)                             | (9)                                  | (10)    | (11)                        | (12)                                 | (13)        | (14)               | (15)                                 | (16)                            | (17)        | (18)                                 | (19)                        | (20)                            | (21)                                 | (22)    | (23)                        | (24)                                 | (25)        | (26)               | (27)                                 | (28)                            | (29)        | (30)                                 | (31)                        | (32)                            |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN              |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | NON UMUM                                                   |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGUJIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90%                       | DKPKP              | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II                         | DKPKP       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II                     | DKPKP                           | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II | DKPKP                       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II     | DKPKP              | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II                         | DKPKP       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II                     | DKPKP                           | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II | DKPKP                       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II     | DKPKP              | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II                         | DKPKP       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%<br>4. 90% | APBD II                     | DKPKP                           |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu<br>2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu<br>3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%                                 | DKPKP              | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II                         | DKPKP       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II                     | DKPKP                           | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II | DKPKP                       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II     | DKPKP              | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II                         | DKPKP       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II                     | DKPKP                           | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II | DKPKP                       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II     | DKPKP              | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II                         | DKPKP       | 1. 90%<br>2. 90%<br>3. 90%           | APBD II                     | DKPKP                           |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun                                                                                                                                            | 7 dokumen                                                  | DKPKP              | 7 dokumen                            | 47.847.500                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 dokumen                   | 52.632.250                      | APBD II                              | DKPKP   | 7 dokumen                   | 103.051.109                          | APBD II     | DKPKP              | 7 dokumen                            | 63.855.240                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 dokumen                   | 71.600.507                      | APBD II                              | DKPKP   | 7 dokumen                   | 67.862.958                           | APBD II     | DKPKP              | 7 dokumen                            | 57.895.475                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 dokumen                   | 57.895.475                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Intisar Realisasi Kinerja SKPD      | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Intisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan                                                                                        | 12 kegiatan dan 24 dokumen                                 | DKPKP              | 12 kegiatan dan 24 dokumen           | 22.385.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 kegiatan dan 24 dokumen  | 24.623.500                      | APBD II                              | DKPKP   | 12 kegiatan dan 24 dokumen  | 74.329.618                           | APBD II     | DKPKP              | 12 kegiatan dan 24 dokumen           | 35.376.905                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 kegiatan dan 24 dokumen  | 35.229.848                      | APBD II                              | DKPKP   | 12 kegiatan dan 24 dokumen  | 39.633.380                           | APBD II     | DKPKP              | 12 kegiatan dan 24 dokumen           | 27.085.850                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 kegiatan dan 24 dokumen  | 27.085.850                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase unit kerja yang menyusun laporan keuangan dengan baik                                                                                                                                     | 90%                                                        | DKPKP              | 90%                                  | 3.113.863.319                   | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 3.425.249.651                   | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 4.194.709.233                        | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 4.366.307.571                   | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 4.636.507.566                   | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 4.895.004.724                        | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 3.767.774.616                   | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 3.767.774.616                   | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.02.01 | Persediaan Gaj dan Tunjangan ASN                                                          | Jumlah ASN yang mendapat fasilitas persediaan gaj dan tunjangan                                                                                                                                      | 21 orang                                                   | DKPKP              | 21 orang                             | 3.036.233.319                   | APBD II     | DKPKP                                | 39 orang                    | 3.339.856.651                   | APBD II                              | DKPKP   | 39 orang                    | 4.097.126.879                        | APBD II     | DKPKP              | 39 orang                             | 4.248.648.356                   | APBD II     | DKPKP                                | 39 orang                    | 4.519.295.513                   | APBD II                              | DKPKP   | 39 orang                    | 4.784.582.084                        | APBD II     | DKPKP              | 39 orang                             | 3.673.842.316                   | APBD II     | DKPKP                                | 39 orang                    | 3.673.842.316                   | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD                          | Jumlah penatausahaan dan Pengantar/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                          | 12 dokumen                                                 | DKPKP              | 12 dokumen                           | 30.930.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 dokumen                  | 34.023.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 12 dokumen                  | 38.086.118                           | APBD II     | DKPKP              | 12 dokumen                           | 44.776.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 dokumen                  | 44.629.348                      | APBD II                              | DKPKP   | 12 dokumen                  | 49.032.880                           | APBD II     | DKPKP              | 12 dokumen                           | 37.425.300                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 dokumen                  | 37.425.300                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.02.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan                                                                                                                      | 1 kegiatan dan 1 laporan                                   | DKPKP              | 1 kegiatan dan 1 laporan             | 45.925.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 1 kegiatan dan 1 laporan    | 50.517.500                      | APBD II                              | DKPKP   | 1 kegiatan dan 1 laporan    | 54.980.618                           | APBD II     | DKPKP              | 1 kegiatan dan 1 laporan             | 61.272.905                      | APBD II     | DKPKP                                | 1 kegiatan dan 1 laporan    | 61.123.848                      | APBD II                              | DKPKP   | 1 kegiatan dan 1 laporan    | 65.527.388                           | APBD II     | DKPKP              | 1 kegiatan dan 1 laporan             | 55.569.250                      | APBD II     | DKPKP                                | 1 kegiatan dan 1 laporan    | 55.569.250                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD yang tersusun | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD yang tersusun                                                                                                                               | 13 laporan                                                 | DKPKP              | 13 laporan                           | 775.000                         | APBD II     | DKPKP                                | 13 laporan                  | 852.500                         | APBD II                              | DKPKP   | 13 laporan                  | 4.915.618                            | APBD II     | DKPKP              | 13 laporan                           | 11.607.905                      | APBD II     | DKPKP                                | 13 laporan                  | 11.458.849                      | APBD II                              | DKPKP   | 13 laporan                  | 15.862.380                           | APBD II     | DKPKP              | 13 laporan                           | 937.750                         | APBD II     | DKPKP                                | 13 laporan                  | 937.750                         | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kendali baik                                                                                                                                  | 7 jenis dan 651 unit/buah                                  | DKPKP              | 7 jenis dan 651 unit/buah            | 27.250.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 29.975.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 34.036.118                           | APBD II     | DKPKP              | 7 jenis dan 651 unit/buah            | 40.730.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 40.581.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 44.984.880                           | APBD II     | DKPKP              | 7 jenis dan 651 unit/buah            | 32.972.500                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 32.972.500                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola                                                                                                                                                   | 7 jenis dan 651 unit/buah                                  | DKPKP              | 7 jenis dan 651 unit/buah            | 27.250.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 29.975.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 34.036.118                           | APBD II     | DKPKP              | 7 jenis dan 651 unit/buah            | 40.730.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 40.581.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 44.984.880                           | APBD II     | DKPKP              | 7 jenis dan 651 unit/buah            | 32.972.500                      | APBD II     | DKPKP                                | 7 jenis dan 651 unit/buah   | 32.972.500                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.04    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                | Persentase pengalangan retribusi yang diterima Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 90%                                                        | DKPKP              | 90%                                  | 25.050.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 27.555.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 31.618.118                           | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 38.310.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 38.161.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 42.564.880                           | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 30.310.500                      | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 30.310.500                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.04.07 | Pelaporan Pengalangan Retribusi Daerah                                                    | Jumlah pengalangan retribusi yang di laporkan                                                                                                                                                        | 12 Laporan                                                 | DKPKP              | 12 Laporan                           | 25.050.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 laporan                  | 27.555.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 12 laporan                  | 31.618.118                           | APBD II     | DKPKP              | 12 laporan                           | 38.310.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 laporan                  | 38.161.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 12 laporan                  | 42.564.880                           | APBD II     | DKPKP              | 12 laporan                           | 30.310.500                      | APBD II     | DKPKP                                | 12 laporan                  | 30.310.500                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                                       | 90%                                                        | DKPKP              | 90%                                  | 13.800.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 15.180.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 19.243.118                           | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 25.935.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 34.786.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 30.189.880                           | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 16.698.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 16.698.000                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.05.10 | Sosialisai Peraturan Penunjang Undangan                                                   | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                                                                                                                                                                 | 4 kegiatan dan 4 laporan                                   | DKPKP              | 4 kegiatan dan 4 laporan             | 13.800.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 4 kegiatan dan 4 laporan    | 15.180.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 4 kegiatan dan 4 laporan    | 19.243.118                           | APBD II     | DKPKP              | 4 kegiatan dan 4 laporan             | 25.935.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 4 kegiatan dan 4 laporan    | 34.786.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 4 kegiatan dan 4 laporan    | 30.189.880                           | APBD II     | DKPKP              | 4 kegiatan dan 4 laporan             | 16.698.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 4 kegiatan dan 4 laporan    | 16.698.000                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                                              | 90%                                                        | DKPKP              | 90%                                  | 248.771.760                     | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 323.648.936                     | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 352.090.762                          | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 398.936.771                     | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 406.893.379                     | APBD II                              | DKPKP   | 90%                         | 428.718.096                          | APBD II     | DKPKP              | 90%                                  | 356.013.830                     | APBD II     | DKPKP                                | 90%                         | 356.013.830                     | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06.01 | Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Perenggan Bangunan Kantor                           | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Perenggan Bangunan Kantor yang disediakan                                                                                                                          | 10 jenis dan 30 unit/buah                                  | DKPKP              | 10 jenis dan 30 unit/buah            | 2.439.080                       | APBD II     | DKPKP                                | 10 jenis dan 30 unit/buah   | 2.682.988                       | APBD II                              | DKPKP   | 10 jenis dan 30 unit/buah   | 6.746.106                            | APBD II     | DKPKP              | 10 jenis dan 30 unit/buah            | 13.438.393                      | APBD II     | DKPKP                                | 10 jenis dan 30 unit/buah   | 13.289.337                      | APBD II                              | DKPKP   | 10 jenis dan 30 unit/buah   | 17.692.868                           | APBD II     | DKPKP              | 10 jenis dan 30 unit/buah            | 2.961.287                       | APBD II     | DKPKP                                | 10 jenis dan 30 unit/buah   | 2.961.287                       | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06.02 | Persediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor                                          | Jumlah Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor disediakan                                                                                                                                              | 72 jenis dan 3926 unit/buah                                | DKPKP              | 72 jenis dan 3926 unit/buah          | 85.949.030                      | APBD II     | DKPKP                                | 72 jenis dan 3926 unit/buah | 94.543.933                      | APBD II                              | DKPKP   | 72 jenis dan 3926 unit/buah | 98.607.051                           | APBD II     | DKPKP              | 72 jenis dan 3926 unit/buah          | 105.299.338                     | APBD II     | DKPKP                                | 72 jenis dan 3926 unit/buah | 105.150.282                     | APBD II                              | DKPKP   | 72 jenis dan 3926 unit/buah | 109.553.813                          | APBD II     | DKPKP              | 72 jenis dan 3926 unit/buah          | 103.988.326                     | APBD II     | DKPKP                                | 72 jenis dan 3926 unit/buah | 103.988.326                     | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06.04 | Persediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                                                                         | 5 jenis dan 400 unit/buah                                  | DKPKP              | 5 jenis dan 400 unit/buah            | 51.080.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 5 jenis dan 400 unit/buah   | 56.188.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 5 jenis dan 400 unit/buah   | 60.251.118                           | APBD II     | DKPKP              | 5 jenis dan 400 unit/buah            | 66.943.405                      | APBD II     | DKPKP                                | 5 jenis dan 400 unit/buah   | 66.794.349                      | APBD II                              | DKPKP   | 5 jenis dan 400 unit/buah   | 71.197.880                           | APBD II     | DKPKP              | 5 jenis dan 400 unit/buah            | 61.806.800                      | APBD II     | DKPKP                                | 5 jenis dan 400 unit/buah   | 61.806.800                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06.06 | Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                   | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                                                                  | 5 jenis dan 10000 unit/buah                                | DKPKP              | 5 jenis dan 10000 unit/buah          | 7.043.650                       | APBD II     | DKPKP                                | 5 jenis dan 10000 unit/buah | 7.748.015                       | APBD II                              | DKPKP   | 5 jenis dan 10000 unit/buah | 11.811.133                           | APBD II     | DKPKP              | 5 jenis dan 10000 unit/buah          | 18.503.420                      | APBD II     | DKPKP                                | 5 jenis dan 10000 unit/buah | 18.354.364                      | APBD II                              | DKPKP   | 5 jenis dan 10000 unit/buah | 22.757.895                           | APBD II     | DKPKP              | 5 jenis dan 10000 unit/buah          | 8.532.817                       | APBD II     | DKPKP                                | 5 jenis dan 10000 unit/buah | 8.532.817                       | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06.06 | Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang undangan yang disediakan                  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang undangan yang disediakan                                                                                                                                 | 15 jenis dan 180 eksemplar                                 | DKPKP              | 15 jenis dan 180 eksemplar           | 23.359.000                      | APBD II     | DKPKP                                | 15 jenis dan 180 eksemplar  | 25.694.950                      | APBD II                              | DKPKP   | 15 jenis dan 180 eksemplar  | 29.798.018                           | APBD II     | DKPKP              | 15 jenis dan 180 eksemplar           | 36.450.305                      | APBD II     | DKPKP                                | 15 jenis dan 180 eksemplar  | 36.301.249                      | APBD II                              | DKPKP   | 15 jenis dan 180 eksemplar  | 40.704.780                           | APBD II     | DKPKP              | 15 jenis dan 180 eksemplar           | 28.264.390                      | APBD II     | DKPKP                                | 15 jenis dan 180 eksemplar  | 28.264.390                      | APBD II     | DKPKP  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| 01.2.06.09 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan                                                                                                                                     | -                                                          | DKPKP              | -                                    | -                               | APBD II     | DKPKP                                | 1 sistem                    | 50.000.000                      | APBD II                              | DKPKP   | 1 sistem                    | 54.063.118                           | APBD II     | DKPKP              | 1 sistem                             | 60.755.405                      | APBD II     |                                      |                             |                                 |                                      |         |                             |                                      |             |                    |                                      |                                 |             |                                      |                             |                                 |             |        |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |

|    | (1) | (2) | (3)                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                                                                                               | (6)                                     | (7)              | (8)           | (9)         | (10)             | (11)                   | (12)                                    | (13)           | (14)                     | (15)                   | (16)                                    | (17)          | (18)                     | (19)                   | (20)                                    | (21)          | (22)                     | (23)                   | (24)                                    | (25)          | (26)                     | (27)                   | (28)                                    | (29)          | (30)                     | (31)                   | (32)                                    |                |                          |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 2  | 09  | 02  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA BOKOM UNIK KEDUALUATAN DAN KEMERDIAAN PANGAN | perencanaan infrastruktur kemudian dan kemudian pangan dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                     | 0%                                                                                                | Kab. Pangandaran                        |                  |               | 8%          | 5.750.000.000    | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 8%             | 6.325.000.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 8%            | 6.957.500.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 8%            | 7.653.250.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 8%            | 8.418.575.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 8%            | 6.325.000.000            | APBD II dan APBN / DAK |                                         |                |                          |
| 2  | 09  | 02  | 2.01                                                                         | Perencanaan Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                            | Perencanaan infrastruktur pendukung kemudian pangan yang dalam kondisi baik                       | 0                                       | Kab. Pangandaran |               | 14%         | 5.750.000.000    | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 14%            | 6.325.000.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 14%           | 6.957.500.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 14%           | 7.653.250.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 14%           | 8.418.575.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 14%           | 6.325.000.000            | APBD II dan APBN / DAK |                                         |                |                          |
| 2  | 09  | 02  | 2.01.01                                                                      | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan yang dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang dalam kondisi baik                                       | 0 unit                                  | Kab. Pangandaran |               |             | 5 unit           | 5.750.000.000          | APBD II dan APBN / DAK                  | 5 unit         | 6.325.000.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 5 unit        | 6.957.500.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 5 unit        | 7.653.250.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 5 unit        | 8.418.575.000            | APBD II dan APBN / DAK | Kab. Pangandaran                        | 5 unit        | 6.325.000.000            | APBD II dan APBN / DAK |                                         |                |                          |
| 2  | 09  | 03  | PROGRAM PENINGKATAN OVERSEKSIKASIDAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT             | 2. Angka Kecelakaan Energi 2. Angka Kecelakaan Protein                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 94.5 skor 2. via                                                                               | Kab. Pangandaran                        | 1. 2100 2. 57    | 102.762.500   | APBD II     | Kab. Pangandaran | 1. 2100 2. 57          | 2.180.000.000                           | APBD II        | Kab. Pangandaran         | 1. 2100 2. 57          | 2.398.000.000                           | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 1. 2100 2. 57          | 2.637.800.000                           | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 1. 2100 2. 57          | 2.901.580.000                           | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 1. 2100 2. 57          | 3.191.738.000                           | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 1. 2100 2. 57          | 2.398.000.000                           | APBD II        |                          |
| 2  | 09  | 03  | 2.01                                                                         | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan                                                                                                                                                                    | Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                  | 0 ton                                   | Kab. Pangandaran | 10 Ton        | 74.797.500  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 10 Ton                                  | 30.000.000     | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 Ton                                  | 31.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 Ton                                  | 36.300.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 Ton                                  | 39.930.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 Ton                                  | 43.920.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 Ton                                  | 31.000.000     | APBD II                  |
| 2  | 09  | 03  | 2.01.01                                                                      | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah penerima bibit/bibit tanaman                                                               | 3 kelompok                              | Kab. Pangandaran | 1 desa        | 51.388.500  | APBD II          | Kab. Pangandaran       |                                         |                |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |                |                          |
| 2  | 09  | 03  | 2.01.04                                                                      | Pemerataan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah laporan pemerataan stok, pasokan, dan harga pangan yang diadukan                           | 12 dokumen                              | Kab. Pangandaran | 24 dokumen    | 23.411.000  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 24 dokumen                              | 30.000.000     | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 24 dokumen                              | 32.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 24 dokumen                              | 36.300.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 24 dokumen                              | 39.930.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 24 dokumen                              | 43.920.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 24 dokumen                              | 32.000.000     | APBD II                  |
| 2  | 09  | 03  | 2.02                                                                         | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Cadangan Pangan yang diadukan                                                              | 51 ton                                  | Kab. Pangandaran |               |             | Kab. Pangandaran |                        | 100.000.000                             | APBD II        | Kab. Pangandaran         | 61 Ton                 | 110.000.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 61 Ton                 | 121.000.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 61 Ton                 | 133.100.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 61 Ton                 | 146.410.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 61 Ton                 | 110.000.000                             | APBD II        |                          |
| 2  | 09  | 03  | 2.02.02                                                                      | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemertukar Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah cadangan pangan yang diadukan                                                              | 10 ton beras                            | Kab. Pangandaran |               |             | Kab. Pangandaran |                        | 100.000.000                             | APBD II        | Kab. Pangandaran         | 10 Ton Beras           | 110.000.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 10 Ton Beras           | 121.000.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 10 Ton Beras           | 133.100.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 10 Ton Beras           | 146.410.000                             | APBD II       | Kab. Pangandaran         | 10 Ton Beras           | 110.000.000                             | APBD II        |                          |
| 2  | 09  | 03  | 2.04                                                                         | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                                                                                                                                                                                                    | Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein per kapita per tahun, Jumlah penanganan stunting | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | Kab. Pangandaran |               | 27.965.000  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | 2.050.000.000  | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | 2.255.000.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | 2.480.500.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | 2.728.550.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | 3.001.495.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | AKE 2100 Kcal dan AKG 57 gr. 1 kegiatan | 2.255.000.000  | APBD II, APBD I, APBD II |
| 2  | 09  | 03  | 2.04.02                                                                      | Pembudayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pemberdayaan, Jumlah model berorganisasi pangan              | 210 KK                                  | Kab. Pangandaran | 190 KK        | 27.965.000  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 190 KK, 1 unit                          | 2.050.000.000  | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | 190 KK, 1 unit                          | 2.255.000.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | 190 KK, 1 unit                          | 2.480.500.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | 190 KK, 1 unit                          | 2.728.550.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | 190 KK, 1 unit                          | 3.001.495.000 | APBD II, APBD I, APBD II | Kab. Pangandaran       | 190 KK, 1 unit                          | 2.255.000.000  | APBD II, APBD I, APBD II |
| 2  | 09  | 04  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                          | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penyusunan peta rentan rawan pangan (PRWP)                                                        | 5%                                      | Kab. Pangandaran | 5%            | 102.572.500 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 5%                                      | 480.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 4%                                      | 528.800.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 3%                                      | 580.800.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2%                                      | 638.880.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1%                                      | 702.768.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1%                                      | 528.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 04  | 2.01                                                                         | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah laporan PISA daerah yang disusun                                                           | 0 dokumen                               | Kab. Pangandaran | 1 dokumen     | 100.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 1 dokumen                               | 100.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 dokumen                               | 110.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 dokumen                               | 121.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 dokumen                               | 133.100.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 dokumen                               | 146.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 dokumen                               | 110.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 04  | 2.01.01                                                                      | Penyusunan, Penastidaraan dan Analisa Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah laporan analisa kerentanan dan ketahanan pangan yang diserahkan                            | 0 dokumen                               | Kab. Pangandaran | 1 Dokumen     | 100.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 100.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 110.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 121.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 133.100.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 146.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 110.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 04  | 2.02                                                                         | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Daerah rawan pangan yang diadukan                                                          | 0 desa                                  | Kab. Pangandaran | 2 desa        | 102.572.500 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 desa                                  | 380.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       |                                         | 418.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       |                                         | 459.800.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       |                                         | 505.780.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       |                                         | 556.358.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       |                                         | 418.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 04  | 2.02.01                                                                      | Kondisi dan Seleksi/evaluasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah rencana aksi penanganan kerawanan pangan yang diserahkan dengan sinkron dan baik           | 0 kali                                  | Kab. Pangandaran | 5 kali        | 22.869.000  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 5 kali                                  | 80.000.000     | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kali                                  | 88.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kali                                  | 96.800.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kali                                  | 106.480.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kali                                  | 117.128.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kali                                  | 88.000.000     | APBD II                  |
| 2  | 09  | 04  | 2.02.02                                                                      | Pelaksanaan Pengadaan, Pengiriman, dan Penyediaan Cadangan Pangan untuk Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan cadangan pangan                                    | 0 KK                                    | Kab. Pangandaran | 200 KK        | 79.703.500  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 200 KK                                  | 300.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 200 KK                                  | 330.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 200 KK                                  | 363.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 200 KK                                  | 399.300.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 200 KK                                  | 439.230.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 200 KK                                  | 330.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 05  | PROGRAM PENGUASAAN KEAMANAN PANGAN                                           | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                            | Penyusunan pangan segar aman                                                                      | 0%                                      | Kab. Pangandaran | 50%           | 150.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 50%                                     | 150.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 60%                                     | 165.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 65%                                     | 181.500.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 70%                                     | 199.650.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 75%                                     | 219.615.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 80%                                     | 165.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 05  | 2.01                                                                         | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah produk pangan segar yang diawasi dan dibina                                                | 0 produsen                              | Kab. Pangandaran | 10 produsen   | 150.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 10 produsen                             | 165.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 produsen                             | 181.500.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 produsen                             | 199.650.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 produsen                             | 219.650.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 produsen                             | 239.615.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 10 produsen                             | 165.000.000    | APBD II                  |
| 2  | 09  | 05  | 2.01.03                                                                      | Regulasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah produk pangan segar yang terregistrasi, keamanan pengalangan                               | 0 produsen                              | Kab. Pangandaran | 2 produsen    | 50.000.000  | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 produsen                              | 55.000.000     | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 produsen                              | 60.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 produsen                              | 66.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 produsen                              | 73.005.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 produsen                              | 79.205.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 produsen                              | 55.000.000     | APBD II                  |
| 2  | 09  | 05  | 2.01.05                                                                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengalangan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengalangan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan              | 0 kt                                    | Kab. Pangandaran | 5 kt          | 100.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 5 kt                                    | 110.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kt                                    | 121.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kt                                    | 133.100.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kt                                    | 146.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kt                                    | 166.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 kt                                    | 110.000.000    | APBD II                  |
| 03 | 01  |     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Kab. Pangandaran                        |                  | 9.902.381.750 |             |                  |                        | 37.642.158.765                          |                |                          |                        | 39.974.587.906                          |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |                |                          |
| 03 | 25  | 04  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                       | Penyusunan Peta Perikanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penyusunan peta rentan rawan pangan (PRWP)                                                        | 239,96 ton                              | Kab. Pangandaran | 0,20%         | 355.223.750 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 0,20%                                   | 12.580.000.000 | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 0,20%                                   | 6.154.760.500 | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 0,20%                                   | 5.674.051.900 | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 0,20%                                   | 6.211.853.555 | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 0,20%                                   | 6.801.586.576 | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 0,20%                                   | 13.838.000.000 | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.01                                                                         | Penyusunan Peta Perikanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah laporan PISA daerah yang disusun                                                           | 0 poin                                  | Kab. Pangandaran | 0 poin        | 200.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 75 poin                                 | 200.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 75 poin                                 | 220.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 77 poin                                 | 242.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 77 poin                                 | 266.200.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 77 poin                                 | 292.820.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 77 poin                                 | 220.000.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.01.01                                                                      | Penetapan Penyusunan dan Prosedur Penetapan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Model Aung dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah SOP Penetapan Izin Usaha Perikanan                                                         | 0 Dokumen                               | Kab. Pangandaran | 1 Dokumen     | 100.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 100.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 110.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 121.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 133.100.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 146.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 1 Dokumen                               | 110.000.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.01.02                                                                      | Pelayanan Penetapan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Model Aung dan/atau Tenaga Kerja Asing                         | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan                                                    | 0 Dokumen                               | Kab. Pangandaran | 5 Dokumen     | 100.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 5 Dokumen                               | 110.000.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 Dokumen                               | 121.000.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 Dokumen                               | 133.100.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 Dokumen                               | 146.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 Dokumen                               | 166.410.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 5 Dokumen                               | 110.000.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.02                                                                         | Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Ketenakanan Pembudidayaan Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pembudidayaan ikan yang mendapat Bantuan Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Kemitraan Usaha     | 0 Gapokan                               | Kab. Pangandaran | 2 Gapokan     | 125.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 151.250.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 166.375.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 183.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 203.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.02.01                                                                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Ketenakanan Pembudidayaan Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pembudidayaan ikan yang mendapat Bantuan Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Kemitraan Usaha     | 0 Gapokan                               | Kab. Pangandaran | 2 Gapokan     | 125.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 151.250.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 166.375.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 183.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 203.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.02.02                                                                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Ketenakanan Pembudidayaan Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pembudidayaan ikan yang mendapat Bantuan Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Kemitraan Usaha     | 0 Gapokan                               | Kab. Pangandaran | 2 Gapokan     | 125.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 151.250.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 166.375.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 183.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 203.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.03                                                                         | Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Ketenakanan Pembudidayaan Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pembudidayaan ikan yang mendapat Bantuan Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Kemitraan Usaha     | 0 Gapokan                               | Kab. Pangandaran | 2 Gapokan     | 125.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 151.250.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 166.375.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 183.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 203.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.04                                                                         | Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Ketenakanan Pembudidayaan Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pembudidayaan ikan yang mendapat Bantuan Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Kemitraan Usaha     | 0 Gapokan                               | Kab. Pangandaran | 2 Gapokan     | 125.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 151.250.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 166.375.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 183.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 203.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  | 2.04.01                                                                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Ketenakanan Pembudidayaan Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Pembudidayaan ikan yang mendapat Bantuan Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Kemitraan Usaha     | 0 Gapokan                               | Kab. Pangandaran | 2 Gapokan     | 125.000.000 | APBD II          | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 151.250.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 166.375.000   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 183.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 203.012.500   | APBD II                  | Kab. Pangandaran       | 2 Gapokan                               | 137.500.000    | APBD II                  |
| 03 | 25  | 04  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                         |                  |               |             |                  |                        |                                         |                |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |               |                          |                        |                                         |                |                          |

|    |    | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)                                              | (7)                                           | (8)        | (9)              | (10)       | (11)       | (12)        | (13)       | (14)    | (15)             | (16)        | (17)       | (18)    | (19)             | (20)        | (21)       | (22)    | (23)             | (24)        | (25)       | (26)    | (27)             | (28)        | (29)       | (30)    | (31)             | (32)        |            |         |                  |             |            |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |             |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |             |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |              |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |                  |               |               |         |           |
|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 03 | 25 | 04  | 25  | 04  | 06  | Pembaruan dan Pemertan Permudayaan Ikan di Darat | Jumlah kelompok Pemudayaan Ikan yang direvisi | 0 kelompok | Kab. Pangandaran | 0 kelompok | 0 kelompok | 10 kelompok | 50.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 10 kelompok | 50.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 20 kelompok | 60.500.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 20 kelompok | 66.550.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 20 kelompok | 73.205.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 25 kelompok | 80.855.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 30 kelompok | 95.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 35 kelompok | 110.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 40 kelompok | 125.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 45 kelompok | 140.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 50 kelompok | 155.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 55 kelompok | 170.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 60 kelompok | 185.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 65 kelompok | 200.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 70 kelompok | 215.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 75 kelompok | 230.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 80 kelompok | 245.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 85 kelompok | 260.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 90 kelompok | 275.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 95 kelompok | 290.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 100 kelompok | 305.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 105 kelompok | 320.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 110 kelompok | 335.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 115 kelompok | 350.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 120 kelompok | 365.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 125 kelompok | 380.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 130 kelompok | 395.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 135 kelompok | 410.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 140 kelompok | 425.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 145 kelompok | 440.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 150 kelompok | 455.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 155 kelompok | 470.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 160 kelompok | 485.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 165 kelompok | 500.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 170 kelompok | 515.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 175 kelompok | 530.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 180 kelompok | 545.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 185 kelompok | 560.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 190 kelompok | 575.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 195 kelompok | 590.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 200 kelompok | 605.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 205 kelompok | 620.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 210 kelompok | 635.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 215 kelompok | 650.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 220 kelompok | 665.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 225 kelompok | 680.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 230 kelompok | 695.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 235 kelompok | 710.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 240 kelompok | 725.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 245 kelompok | 740.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 250 kelompok | 755.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 255 kelompok | 770.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 260 kelompok | 785.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 265 kelompok | 800.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 270 kelompok | 815.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 275 kelompok | 830.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 280 kelompok | 845.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 285 kelompok | 860.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 290 kelompok | 875.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 295 kelompok | 890.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 300 kelompok | 905.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 305 kelompok | 920.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 310 kelompok | 935.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 315 kelompok | 950.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 320 kelompok | 965.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 325 kelompok | 980.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 330 kelompok | 995.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 335 kelompok | 1.010.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 340 kelompok | 1.025.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 345 kelompok | 1.040.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 350 kelompok | 1.055.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 355 kelompok | 1.070.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 360 kelompok | 1.085.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 365 kelompok | 1.100.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 370 kelompok | 1.115.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 375 kelompok | 1.130.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 380 kelompok | 1.145.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 385 kelompok | 1.160.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 390 kelompok | 1.175.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 395 kelompok | 1.190.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 400 kelompok | 1.205.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 405 kelompok | 1.220.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 410 kelompok | 1.235.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 415 kelompok | 1.250.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 420 kelompok | 1.265.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 425 kelompok | 1.280.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 430 kelompok | 1.295.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 435 kelompok | 1.310.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 440 kelompok | 1.325.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 445 kelompok | 1.340.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 450 kelompok | 1.355.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 455 kelompok | 1.370.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 460 kelompok | 1.385.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 465 kelompok | 1.400.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 470 kelompok | 1.415.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 475 kelompok | 1.430.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 480 kelompok | 1.445.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 485 kelompok | 1.460.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 490 kelompok | 1.475.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 495 kelompok | 1.490.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 500 kelompok | 1.505.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 505 kelompok | 1.520.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 510 kelompok | 1.535.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 515 kelompok | 1.550.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 520 kelompok | 1.565.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 525 kelompok | 1.580.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 530 kelompok | 1.595.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 535 kelompok | 1.610.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 540 kelompok | 1.625.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 545 kelompok | 1.640.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 550 kelompok | 1.655.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 555 kelompok | 1.670.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 560 kelompok | 1.685.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 565 kelompok | 1.700.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 570 kelompok | 1.715.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 575 kelompok | 1.730.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 580 kelompok | 1.745.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 585 kelompok | 1.760.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 590 kelompok | 1.775.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 595 kelompok | 1.790.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 600 kelompok | 1.805.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 605 kelompok | 1.820.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 610 kelompok | 1.835.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 615 kelompok | 1.850.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 620 kelompok | 1.865.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 625 kelompok | 1.880.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 630 kelompok | 1.895.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 635 kelompok | 1.910.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 640 kelompok | 1.925.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 645 kelompok | 1.940.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 650 kelompok | 1.955.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 655 kelompok | 1.970.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 660 kelompok | 1.985.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 665 kelompok | 2.000.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 670 kelompok | 2.015.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 675 kelompok | 2.030.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 680 kelompok | 2.045.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 685 kelompok | 2.060.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 690 kelompok | 2.075.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 695 kelompok | 2.090.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 700 kelompok | 2.105.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 705 kelompok | 2.120.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 710 kelompok | 2.135.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 715 kelompok | 2.150.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 720 kelompok | 2.165.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 725 kelompok | 2.180.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 730 kelompok | 2.195.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 735 kelompok | 2.210.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 740 kelompok | 2.225.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 745 kelompok | 2.240.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 750 kelompok | 2.255.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 755 kelompok | 2.270.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 760 kelompok | 2.285.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 765 kelompok | 2.300.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 770 kelompok | 2.315.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 775 kelompok | 2.330.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 780 kelompok | 2.345.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 785 kelompok | 2.360.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 790 kelompok | 2.375.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 795 kelompok | 2.390.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 800 kelompok | 2.405.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 805 kelompok | 2.420.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 810 kelompok | 2.435.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 815 kelompok | 2.450.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 820 kelompok | 2.465.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 825 kelompok | 2.480.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 830 kelompok | 2.495.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 835 kelompok | 2.510.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 840 kelompok | 2.525.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 845 kelompok | 2.540.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 850 kelompok | 2.555.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 855 kelompok | 2.570.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 860 kelompok | 2.585.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 865 kelompok | 2.600.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 870 kelompok | 2.615.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 875 kelompok | 2.630.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 880 kelompok | 2.645.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 885 kelompok | 2.660.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 890 kelompok | 2.675.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 895 kelompok | 2.690.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 900 kelompok | 2.705.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 905 kelompok | 2.720.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 910 kelompok | 2.735.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 915 kelompok | 2.750.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 920 kelompok | 2.765.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 925 kelompok | 2.780.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 930 kelompok | 2.795.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 935 kelompok | 2.810.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 940 kelompok | 2.825.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 945 kelompok | 2.840.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 950 kelompok | 2.855.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 955 kelompok | 2.870.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 960 kelompok | 2.885.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 965 kelompok | 2.900.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 970 kelompok | 2.915.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 975 kelompok | 2.930.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 980 kelompok | 2.945.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 985 kelompok | 2.960.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 990 kelompok | 2.975.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 995 kelompok | 2.990.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1000 kelompok | 3.005.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1005 kelompok | 3.020.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1010 kelompok | 3.035.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1015 kelompok | 3.050.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1020 kelompok | 3.065.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1025 kelompok | 3.080.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1030 kelompok | 3.095.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1035 kelompok | 3.110.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1040 kelompok | 3.125.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1045 kelompok | 3.140.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1050 kelompok | 3.155.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1055 kelompok | 3.170.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1060 kelompok | 3.185.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1065 kelompok | 3.200.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1070 kelompok | 3.215.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1075 kelompok | 3.230.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1080 kelompok | 3.245.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1085 kelompok | 3.260.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1090 kelompok | 3.275.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1095 kelompok | 3.290.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1100 kelompok | 3.305.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1105 kelompok | 3.320.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1110 kelompok | 3.335.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1115 kelompok | 3.350.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1120 kelompok | 3.365.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1125 kelompok | 3.380.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1130 kelompok | 3.395.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1135 kelompok | 3.410.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1140 kelompok | 3.425.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1145 kelompok | 3.440.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1150 kelompok | 3.455.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1155 kelompok | 3.470.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1160 kelompok | 3.485.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1165 kelompok | 3.500.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1170 kelompok | 3.515.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1175 kelompok | 3.530.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1180 kelompok | 3.545.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1185 kelompok | 3.560.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1190 kelompok | 3.575.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1195 kelompok | 3.590.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1200 kelompok | 3.605.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1205 kelompok | 3.620.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1210 kelompok | 3.635.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1215 kelompok | 3.650.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1220 kelompok | 3.665.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1225 kelompok | 3.680.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1230 kelompok | 3.695.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1235 kelompok | 3.710.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1240 kelompok | 3.725.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1245 kelompok | 3.740.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1250 kelompok | 3.755.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1255 kelompok | 3.770.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1260 kelompok | 3.785.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1265 kelompok | 3.800.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1270 kelompok | 3.815.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1275 kelompok | 3.830.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1280 kelompok | 3.845.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1285 kelompok | 3.860.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1290 kelompok | 3.875.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1295 kelompok | 3.890.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1300 kelompok | 3.905.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1305 kelompok | 3.920.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1310 kelompok | 3.935.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1315 kelompok | 3.950.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1320 kelompok | 3.965.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1325 kelompok | 3.980.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1330 kelompok | 3.995.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1335 kelompok | 4.010.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1340 kelompok | 4.025.000.000 | APED II | Kab. Pangandaran | 1345 kelompok | 4.040.000.000 | APED II | Kab. Pang |

| (1) | (2) | (3) | (4)  | (5) | (6)                                                                                                                                                                                           | (7)                                                                                                                                                                                                                                      | (8)      | (9)                                                                                                                          | (10)                                                        | (11)                 | (12)        | (13)                                                                                                                         | (14)                                                        | (15)          | (16)          | (17)                                                        | (18)          | (19)                 | (20)                                                        | (21)                  | (22)                  | (23)                  | (24)                                                        | (25)                  | (26)                  | (27)                  | (28)                                                        | (29)                  | (30)                  | (31)                  | (32)                                                        |               |                      |
|-----|-----|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 03  | 25  | 03  | 2.05 | 02  | Pelayanan Penertiban Perizinan Pengadaban Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                    | Persentase Pelayanan Penertiban Perizinan Pengadaban Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                    | 0        |                                                                                                                              |                                                             | 1                    | 100.000.000 | APBD II                                                                                                                      |                                                             | 1             | 110.000.000   | APBD II                                                     |               | 1                    | 121.000.000                                                 | APBD II               | Kabupaten Pangandaran | 1                     | 121.000.000                                                 | APBD II               | Kabupaten Pangandaran | 1                     | 113.100.000                                                 | APBD II               | Kabupaten Pangandaran | 1                     | 110.000.000                                                 | APBD II       |                      |
| 03  | 25  | 03  | 2.06 |     | Pendaftaran Kapal Perikanan Bersukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                            | 0        | 0%                                                                                                                           | -                                                           | 100%                 | 200.000.000 | APBD II                                                                                                                      | 100%                                                        | 220.000.000   | APBD II       | 100%                                                        | 242.000.000   | APBD II              | Kabupaten Pangandaran                                       | 100%                  | 242.000.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 100%                  | 266.200.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 100%                  | 220.000.000           | APBD II               |                                                             |               |                      |
| 03  | 25  | 03  | 2.06 | 01  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                              | Jumlah Koordinasi dalam Rangka Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                          | 0 kali   | 0 kali                                                                                                                       | 0                                                           | 2 kali               | 100.000.000 | APBD II                                                                                                                      | 2 kali                                                      | 110.000.000   | APBD II       | 2 kali                                                      | 121.000.000   | APBD II              | Kabupaten Pangandaran                                       | 2 kali                | 121.000.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 2 kali                | 113.100.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 2 kali                | 110.000.000           | APBD II               |                                                             |               |                      |
| 03  | 25  | 03  | 2.06 | 02  | Pelayanan Penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                            | Persentase Pelayanan Penertiban Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                            | 0        | 0                                                                                                                            | 0                                                           | 1                    | 100.000.000 | APBD II                                                                                                                      | 1                                                           | 110.000.000   | APBD II       | 1                                                           | 121.000.000   | APBD II              | Kabupaten Pangandaran                                       | 1                     | 121.000.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 1                     | 113.100.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 1                     | 110.000.000           | APBD II               |                                                             |               |                      |
| 03  | 25  | 05  |      |     | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                         | Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan                                                                                                                                                                                 | 5%       | 5%                                                                                                                           | 13.995.000                                                  | APBD II/APBD I (DAK) | 5%          | 2.280.774.000                                                                                                                | APBD II/APBD I (DAK)                                        | 5%            | 2.508.851.400 | APBD II/APBD I (DAK)                                        | 5%            | 2.759.736.540        | APBD II/APBD I (DAK)                                        | Kabupaten Pangandaran | 5%                    | 3.035.710.194         | APBD II/APBD I (DAK)                                        | Kabupaten Pangandaran | 5%                    | 3.339.281.213         | APBD II/APBD I (DAK)                                        | Kabupaten Pangandaran | 5%                    | 2.508.851.400         | APBD II/APBD I (DAK)                                        |               |                      |
| 03  | 25  | 05  | 2.01 |     | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                                   | Persentase penanganan tindak pelanggaran di bidang perikanan                                                                                                                                                                             | 30%      | Kabupaten Pangandaran                                                                                                        | 13.995.000                                                  | APBD II              | 30%         | 2.280.774.000                                                                                                                | APBD II/APBD I (DAK)                                        | 35%           | 2.508.851.400 | APBD II/APBD I (DAK)                                        | 40%           | 2.759.736.540        | APBD II/APBD I (DAK)                                        | Kabupaten Pangandaran | 45%                   | 3.035.710.194         | APBD II/APBD I (DAK)                                        | Kabupaten Pangandaran | 50%                   | 3.339.281.213         | APBD II/APBD I (DAK)                                        | Kabupaten Pangandaran | 50%                   | 2.508.851.400         | APBD II/APBD I (DAK)                                        |               |                      |
| 03  | 25  | 05  | 2.01 | 01  | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                                 | 1. jumlah lokasi patrol pengawasan yang dilaksanakan<br>2. Jumlah sarana pendukung kegiatan pengawasan yang disediakan<br>3. Jumlah POKMASWAS yang difasilitasi<br>4. Jumlah kelompok masyarakat pengawas<br>5. Jumlah lokasi pengawasan | 3 kali   | 1. Kecamatan Padararang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran<br>2. Kabupaten Pangandaran<br>3. Kabupaten Pangandaran | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 13.995.000           | APBD II     | 1. Kecamatan Padararang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran<br>2. Kabupaten Pangandaran<br>3. Kabupaten Pangandaran | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 2.200.774.000 | APBD II       | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 2.420.851.400 | APBD II/APBD I (DAK) | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 2.662.936.540         | APBD II/APBD I (DAK)  | Kabupaten Pangandaran | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 2.929.220.194         | APBD II/APBD I (DAK)  | Kabupaten Pangandaran | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 3.222.153.213         | APBD II/APBD I (DAK)  | Kabupaten Pangandaran | 1. 3 lokasi<br>2. 4 Jenis<br>3. 9 POKMASWAS<br>4. 0<br>5. 0 | 2.420.851.400 | APBD II/APBD I (DAK) |
| 03  | 25  | 05  | 2.01 | 02  | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembiakidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota                              | Jumlah lokasi patrol pengawasan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                        | 0 Lokasi | Kecamatan Cijulang dan Pang                                                                                                  | 0 Lokasi                                                    | 0 Lokasi             | 80.000.000  | APBD II/APBD I (DAK)                                                                                                         | 2 Lokasi                                                    | 88.000.000    | APBD II       | 2 Lokasi                                                    | 96.800.000    | APBD II              | Kabupaten Pangandaran                                       | 2 Lokasi              | 106.480.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 2 Lokasi              | 117.128.000           | APBD II               | Kabupaten Pangandaran                                       | 2 Lokasi              | 88.000.000            | APBD II               |                                                             |               |                      |